PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2025 - 2029

disketapangkukar

disketapang.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini merupakan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama periode 2025 – 2029.

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan akan memberikan dampak perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga untuk kesempurnaan Dokumen Rancangan Rencana Strategis ini senantiasa dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang lebih konstruktif sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Tenggarong, 17 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANANIAS, S.Hut, MP
Pembina IV/a

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DARTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL.....		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,	8
	2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	22
	2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	23
	2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.	23
	2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	50
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
	3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029....	56
	3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029...	58
	3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.....	60
	3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025 – 2029.....	63
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
	4.1. Uraian Program	65
	4.2. Uraian Kegiatan	67
	4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif.....	76
	4.4. Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	100
	4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah.....	106
	4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	110
BAB V	PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan	15
Tabel	2.2	Sumber Daya Manuasia Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	15
Tabel	2.3	Data Aset Dinas Ketahanan Pangan.....	16
Tabel	2.4	Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	17
Tabel	2.5	Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan.....	17
Tabel	2.6	Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024 Dinas Ketahanan Pangan.....	21
Tabel	2.7	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 – 2024.....	24
Tabel	2.8	Proyeksi Penduduk Tahun 2025 – 2045	25
Tabel	2.9	Daya Dukung Wilayah Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.	25
Tabel	2.10	Data Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama tahun 2020 – 2024	26
Tabel	2.11	Ketersediaan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun dan Skor PPh 2019 – 2024.....	27
Tabel	2.12	Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024.....	28
Tabel	2.13	Produksi Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2024.....	29
Tabel	2.14	Cadangan Beras Tahun 2019 – 2024.....	34
Tabel	2.15	Prognosa Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	35
Tabel	2.16	Pangsa Pengeluaran Penduduk Tahun 2019 – 2024.....	38
Tabel	2.17	Persentase Pengeluaran Per kapita Per bulan Tahun 2020 – 2024	39
Tabel	2.18	Stabilitas Harga Pangan Tahun 2022 – 2025.....	40
Tabel	2.19	Data Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2020 - 2024	42
Tabel	2.20	Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2018 – 2024.....	44
Tabel	2.21	Perkembangan Konsumsi Protein Tahun 2018 – 2024.....	46
Tabel	2.22	Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2018 – 2024	46
Tabel	2.23	Perkembangan Skor PPH Konsumsi Tahun 2018 – 2024	47
Tabel	2.24	Status Gizi Balita Tahun 2022 – 2024.....	49
Tabel	2.25	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan.....	50
Tabel	2.26	Tabel2.1 Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
Tabel	3.1	Tehnik Merumuskan Tujuan, dan Sasaran Renstra	60
Tabel	3.2	Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan	62
Tabel	3.3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	63
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah.	66
Tabel	4.2	Teknik merumuskan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
Tabel	4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	77
Tabel	4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	104
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Daerah.....	108
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.	109
Tabel	4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara	8
Gambar	2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian....	14
Gambar	2.3	Garis Kemiskinan di kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2024.....	37
Gambar	2.4	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2024	37
Gambar	2.5	Situasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2020 – 2024	42
Gambar	2.6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2018 – 2024.....	43
Gambar	2.7	Konsumsi Energi Menurut Kuintil Pengeluaran Penduduk tahun 2024.....	45
Gambar	2.8	Skor PPH Konsumsi Menurut Kuintil Pengeluaran Tahun 2024.....	48
Gambar	3.1	Konsep Renstra Dinas Ketahanan Pangan.....	56
Gambar	3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.....	58
Gambar	4.1	Kerangka Perumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029	65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menandai periode baru pembangunan jangka menengah daerah pada Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 ditentukan dan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2029. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Pangan.

Proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah ini menerapkan prinsip kesetaraan gender, dan berpedoman pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen RENSTRA ini digunakan sebagai instrumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kebijakan, sekaligus berfungsi sebagai pengukur keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 tahun.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan untuk kurun waktu 20 tahun, berisi visi pembangunan jangka panjang beserta arah dan tahapan pembangunan dalam empat periode lima tahunan. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun untuk periode lima tahun sejalan dengan masa jabatan kepala daerah, yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas pembangunan daerah. Untuk mengoperasionalkan RPJMD, setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) sebagai dokumen lima tahunan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen tahunan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan berfungsi sebagai dokumen teknis operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah akan berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema transformasi mengacu tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan turunan langsung dari RPJPD, RPJMD, dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai kewenangan perangkat daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 yang dimuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara: Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Periode pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung selama periode 2025-2029. Pada periode pertama ini, agenda pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dititikberatkan pada Penguatan Fondasi Transformasi. Upaya pengokohan fondasi transformasi secara umum tersusun atas perwujudan aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Hal ini diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029, dengan Visi KUKAR IDAMAN TERBAIK :

Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Dalam mencapai Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 5 Misi. Secara umum seluruh misi tersebut bersinggungan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, namun secara khusus Dinas Ketahanan Pangan mengemban dua misi yaitu , Misi ke-1 (pertama), yaitu Terbaik dalam Mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial. Dan Misi kedua Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode 2025–2029 juga mempertimbangkan mandat nasional dan regional. Pada RPJMN 2025–2029, Kutai Kartanegara ditetapkan memegang empat mandat utama: (1) Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN), (2) Sentra Perikanan Kalimantan Timur, (3) Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata, serta (4) bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo)*. Sinergis dengan 4 poin tersebut, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 mengarahkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan, sentra perkebunan, perikanan, agroindustri, dan pariwisata yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung ekonomi.

Dengan kondisi, mandat, dan regulasi tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 disusun untuk menjamin keselarasan, sinkronisasi, kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di bidang ketahanan pangan yang fokus sasaran pembangunannya diarahkan pada Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 mengacu pada regulasi dan peraturan yang berlaku, diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4) Undang-Undang No 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
8) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
9) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
10) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
11) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67); kemudian dapat di tambahkan pada arah kebijakan Perangkat Daerah
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Perda RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
17) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi
18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
19) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2042.
20) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – Tahun 2045.
21) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan
22) Peraturan daerah Kabupaten kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 mempunyai maksud sebagai berikut :

1) Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yang sinergis dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
2) Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan selama kurunwaktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam kurun waktu 2025-2029.
2) Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
3) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan.
5) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
6) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 adalah:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2. Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Renstra Perangkat daerah tahun 2025 – 2029
3.2. Sasaran Renstra Perangkat daerah tahun 2025 – 2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegatan
4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif.
4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah
4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan
4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

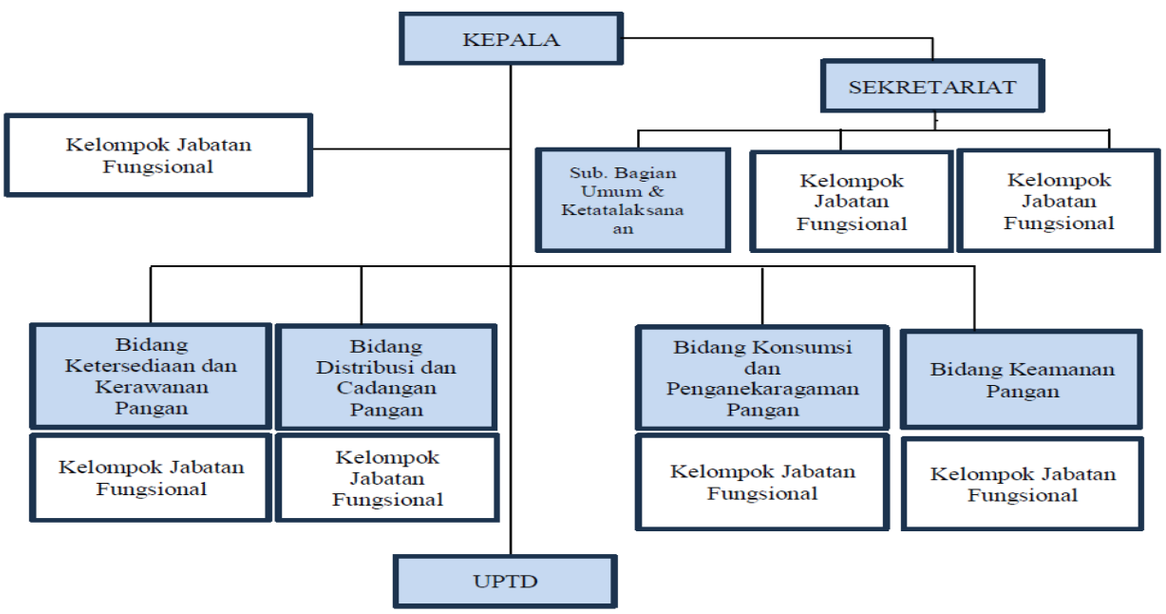

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

1) Kepala Dinas
   a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas,
   b. merumuskan kebijakan teknis dinas,
   c. merumuskan rencana program kerja dinas,
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas,
   e. merumuskan kebijakan administrasi dinas,
   f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dinas,
   g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke badan perencanaan pembangunan daerah,
   h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,
   i. mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja, standar pelayanan (SP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) urusan kepala dinas.
2) Sekretaris
   a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
   b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian,
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi, perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan *e-government*, kompilasi SOP, standar pelayanan (SP), perjanjian kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang- undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat,

Whistle Blowing System (WBS), pedoman umum sistem penanganan pengaduan, *survey* indeks kepuasan masyarakat, *survey* internal organisasi, *survey* indeks nilai persepsi korupsi,

e. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPEG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P,

f. mengkoordinasikan pelaksanaan LKJiP, sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD,

g. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan, dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan,

h. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, daftar nominatif presensi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urut kepegawaian (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi, dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa di lingkungan dinas,

j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariatan di lingkungan dinas.

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan ketersediaan pangan, sumberdaya pangan dan kerawanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan,

c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan *Standard Operating Procedure* (SOP) urusan ketersediaan dan kerawanan pangan,

d. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan ketersediaan dan kerawanan pangan,
e. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan.

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan distribusi pangan, harga pangan, harga pangan dan cadangan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b. mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat dari menurunnya ketersediaan pangan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan *monitoring* cadangan pangan masyarakat,
c. mengkoordinasikan kegiatan penanganan dan penyaluran pangan untuk masyarakat rawan pangan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan rapat koordinasi untuk proses penanganan secara cepat, tepat dan terpadu,
d. mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan mengusulkan pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan Kabupaten melalui pengembangan jaringan pasar melalui perumusan serta sosialisasi pola-pola distribusi, kemitraan, kelembagaan, dan sarana prasarana distribusi untuk meningkatkan distribusi pangan,
e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi dan saran teknis dengan instansi terkait meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi pangan, pengembangan pasar produk pangan dan *trust fund* untuk kepentingan ketahanan pangan,
f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan *Standar Operating Procedure* (SOP) urusan distribusi dan cadangan pangan,
g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan distribusi dan cadangan pangan,
h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan distribusi dan cadangan pangan.

5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b. mengkoordinasi pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal,
c. mengkoordinasi penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal,
d. mengkoordinasi dengan instansi terkait tentang kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian, dan sosialisasi mutu dan keamanan pangan, analisis mutu gizi, keamanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat, pembinaan sistemjaminan mutu dan penerapan standar batas maksimum residu (BMR), serta pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di daerah,
e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), termasuk kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) non beras non terigu serta gerakan makan B2SA terhadap murid SD/MI dengan instansi terkait,
f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemantauan *survey* baik analisis pola pangan harapan (PPH) maupun analisis Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta pola konsumsi pangan dengan instansi terkait,
g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan *Standard Operating Procedure* (SOP) urusan konsumsi dan penganekaragaman pangan,
h. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan konsumsi dan penganekaragaman pangan,
i. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan konsumsi dan penganekaragaman pangan.

6) Bidang Keamanan Pangan

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,

kerjasama dan informasi keamanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. mengkoordinasikan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan,
c. mengkoordinasikan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan,
d. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan *Standard Operating Procedure* (SOP) urusan keamanan pangan,
e. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan keamanan pangan,
f. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan keamanan pangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik merupakan syarat dasar untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik didasari oleh prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum yang kuat, transparansi, responsivitas, kesetaraan, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal sumberdaya aparatur, perlu menjadi prioritas utama dalam program saat ini dan masa depan. Sumber daya aparatur pemerintah, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pemerintahan, menempati posisi strategis dan berpengaruh dalam menentukan arah perkembangan suatu daerah.

Pemerintah daerah bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik dengan fungsi utama memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan harus mampu menginterpretasikan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan fokus pada kepentingan masyarakat hingga masa yang akan datang. Lebih lanjut, pemerintahan yang cerdas hanya dapat terwujud jika aparatur yang mendukungnya juga cerdas.

2.1.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara per Juni 2025 sebanyak 69 orang, dimana 50 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang merupakan Non ASN THL. Perbandingan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

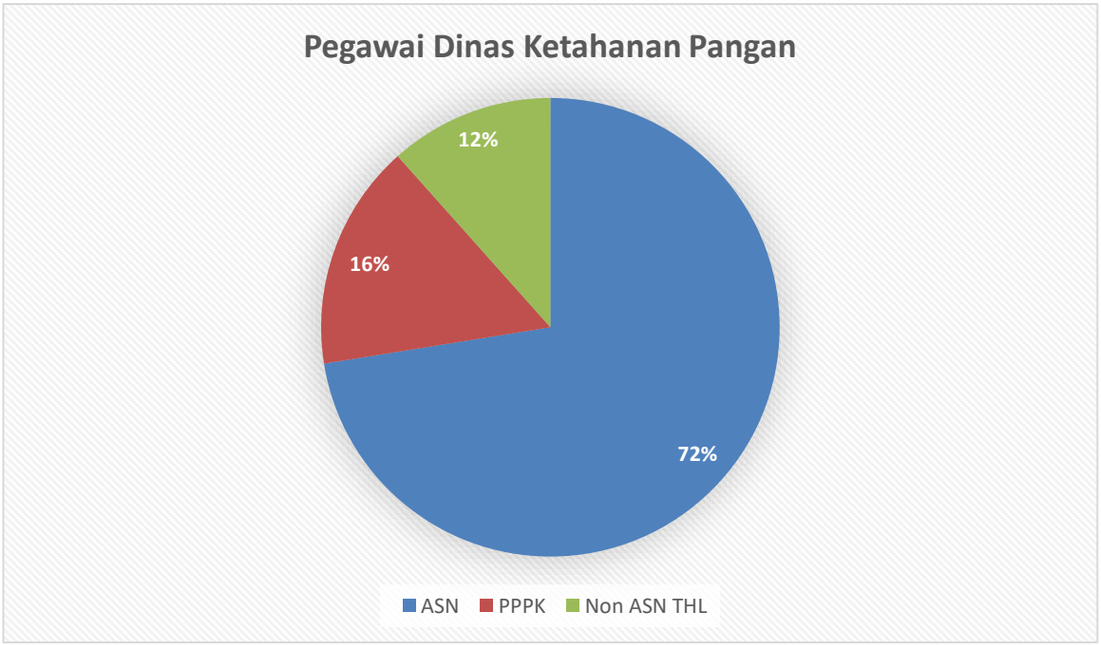

Penjelasan mengenai pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Pembina Utama Muda Gol IV/c	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tingkat I Gol IV/b	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembina Gol IV/a	10	-	-	-	-	-	10
4	Penata Tingkat I Gol. III/d	-	21	-	-	-	-	21
5	Penata Gol III/c	-	1	-	-	-	-	1
6	Penata Muda Tingkat I Gol III/b	-	4	-	-	-	-	4
7	Penata Muda Gol III/a	-	3	-	-	-	-	3
8	Pengatur Tingkat I Gol II/d	-	-	-	11	-	-	11
9	Pengatur Gol II/c	-	-	-	-	-	-	-
10	Gol III (PPPK – 09)	-	5	-	-	-	-	5
11	Gol II (PPPK – 05)	-	-	-	6	-	-	6
	JUMLAH	10	34	-	17	-	-	61

Tabel 2.2. Sumberdaya Manusia di Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Karakteristik Uraian	**ASN**	**PPPK**	**Non ASN**
Tingkat Pendidikan SMA S1 S2	 11 29 10	 6 5	 4 4
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan	 23 27	 3 8	 4 4

Kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia berkaitan dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan tertinggi sumberdaya manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara per Juni 2025 adalah S2 (Magister) dan tingkat pendidikan terendah adalah SMA. Sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam peningkatan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan secara umum. Berdasarkan Tabel 1.2, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak diraih oleh sumberdaya manusia di Dinas Ketahanan Pangan adalah jenjang Sarjana (54,43%), dimana 29 merupakan ASN dan 5 orang PPPK dan 4 orang Non-ASN.

2.1.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menempati Gedung D Lantai 2 yang terletak di kompleks perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong Kalimantan Timur. Selain Gedung yang ditempati, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sejumlah aset yang tercatat dalam SIMDA BMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 2025 sebesar Rp.11.176.478.770,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), meliputi Bangunan Gedung, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tabel 2.3. Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Bangunan Gedung	1.706.268.952,00
2	Peralatan dan Mesin	8.917.928.468.,00
3	Aset Tetap Lainnya	6.639.500,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	545.641.850,00
Total Nilai aset Per 30 Juni 2025		11.176.478.770,00

Untuk menunjang kegiatan operasional pegawai struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025 memiliki kendaraan dinas baik mobil dinas maupun sepeda motor dinas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No.	Merk Kendaraan	Jumlah	Tahun	Sumber	Keterangan
1.	Mobil Dinas				
	Nissan Navara	2 unit	2012/2013	APBD	Kurang Baik
	Toyota Rush	1 unit	2024	APBD	baik
	Toyota Rush	3 unit	2025	APBD	baik
	Toyota Innova	1 unit	2008	APBD	baik
	Mobil Lab Keamanan Pangan	1 Unit	2016	APBD	Baik
	Mobil Pengendalian Inflasi	1 Unit	2023	APBD	Baik
	Mobil Inova Zenix	1 Unit	2024	APBD	Baik
2.	Sepeda Motor				
	Yamaha Vixon	2 unit	2013	APBD	baik
	Honda Supra X	15 unit	2010	APBD	baik
	Honda Mega Pro	2 unit	2010	APBD	baik
	Honda Revo	4 unit	2007	APBD	baik

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2025 meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, dan peralatan kantor lainnya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

Nama Aset	Jumlah (Unit)	Keterangan
Alat-alat besar	4	
- Traktor lain-lain	1	Kurang baik
- Mesin proses lain-lain	3	Kurang baik
Alat-alat angkutan	33	
- *Station wagon*	2	Baik
- Alat angkutan darat bermotor	2	Baik
- *Pick-up*	1	Baik
- Kendaraan bermotor angkutan barang	2	Kurang Baik
- Sepeda motor	26	Kurang Baik
Alat bengkel dan alat ukur	17	
- Tripod	3	Baik
- pH meter	6	Kurang Baik
- *Scanner*	1	Baik
- Alat ukur lainnya (lain-lain)	7	Kurang Baik
Alat pertanian	23	
- Alat panen/pengolahan lain-lain	1	Kurang baik
- Lemari penyimpanan	4	Baik
- Alat laboratorium pertanian lain-lain	7	Kurang baik

Nama Aset	Jumlah (Unit)	Keterangan
- Alat *processing* lain-lain	9	Kurang Baik
- Alat perontok (*theresar* pedal)	1	Kurang Baik
- Alat panen lain-lain	1	Kurang baik
Alat kantor dan rumah Tangga	418	
- Mesin ketik manual portable (11-13)	4	Kurang baik
- Mesin ketik manual standar (14-16)	1	Kurang Baik
- Mesin ketik manual longewagen (18)	3	Kurang Baik
- Mesin absen (*time recorder*)	1	Baik
- Mesin *foto-copy*	1	Baik
- Rak kayu	5	Kurang Baik
- *Filling* besi/metal	16	Baik
- Lemari kaca	16	Baik
- *White board*	22	Kurang Baik
- Mesin absensi	9	Baik
- *Overhead projector*	6	Kurang Baik
- Alat kantor lainnya (lain-lain)	1	Kurang Baik
- Lemari kayu	5	Baik
- Meja rapat	33	Baik
- Meja tambahan	11	Baik
- Meja panjang	6	Baik
- Kursi tamu	4	Baik
- Kursi putar	12	Kurang Baik
- Meja komputer	3	Baik
- Sofa	1	Baik
- Mesin potong rumput	2	Kurang Baik
- Lemari es	3	Baik
- AC *split*	14	Baik
- *Portable air conditioner*	4	Baik
- Alat Pendingin lain-lain	2	Baik
- Alat dapur lainnya	6	Kurang Baik
- Alat Pendingin lain-lain	2	Baik
- Alat dapur lainnya	6	Kurang Baik
- *Kitchen set*	1	Kurang Baik
- Televisi	5	Baik
- *Amplifier*	1	Baik
- *Loudspeaker*	1	Baik
- *Sound system*	3	Baik
- *Wireless*	1	Baik
- *Camera video*	1	Baik
- *Camera film*	12	Baik
- Dispenser	11	Baik
- *Handy cam*	3	Baik
- *Drone*	1	Baik
- Alat rumah tangga lain-lain	2	Baik
- Gorden	1	Kurang Baik
- Tabung pemadam kebakaran (apar)	1	Baik
- PC *unit*	31	Baik

Nama Aset	Jumlah (Unit)	Keterangan
- *Notebook*	21	Baik
- Personal komputer lain-lain	9	Baik
- Peralatan komputer *mainframe* lain-lain	6	Baik
- *Printer*	28	Baik
- *Scanner*	3	Baik
- *Portable hardisk*	7	Baik
- Peralatan mini komputer lain-lain	3	Baik
- *Smart board* tv	3	Baik
- *Monitor*	3	Baik
- CCTV	1	Baik
- *Server*	1	Baik
- Peralatan jaringan lain-lain	1	Baik
- Meja kerja pejabat eselon II	1	Baik
- Meja kerja pejabat eselon III	1	Baik
- Meja kerja pegawai non struktural	11	Baik
- Meja kerja pejabat lain-lain	12	Baik
- Kursi kerja pejabat eselon II	1	Baik
- Lemari arsip untuk arsip dinamis	2	Baik
Alat studio dan alat komunikasi	42	
- Proyektor dan *attachment*	12	Baik
- *Microphone/wireless mic*	1	Baik
- *Uninterruptible power supply*	2	Baik
- *Video tape recorder portable*	1	Baik
- Lensa kamera	5	Baik
- Megaphone	2	Baik
- *Handy talkie*	11	Kurang Baik
- *Faximile*	2	Baik
- *Wireless amplifier*	5	Baik
- Peralatan antena penerima VHF lain-lain	1	Kurang Baik
- Alat laboratorium	25	
- *Screen*	1	Kurang Baik
- *Hand extractor*	2	Kurang Baik
- *Mixer*	2	Kurang Baik
- Organ/*electone*	1	Kurang Baik
- *Moisture tester*	7	Kurang Baik
Total	562	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja pada masing-masing program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai di tahun tersebut dengan standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan. Tabel 2.6 berikut merupakan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 hingga 2025.

Tabel 2.6 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10		12	13	14	15	15	17	18	19	20	20
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)				76,01	77	78	79	80	76,01	74,28	88,89	66,94	68,52	100,00	96,47	113,96	113,96	85,65
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)				128,72	129	130	134	137	113,97	118	118,46	102,95	108,65	88,54	91,47	91,12	91,12	79,31
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				96,48	96,48	97,89	98,59	99,3	97,1	93,66	92,83	94,12	95,5	-	97,08	94,83	94,83	96,17
4	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)				2365	2372	2378	2387	2393	2342	2458	2779	2546	2420	-	103,63	116,86	116,86	101,13
5	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)				79,04	79,42	79,81	80,21	80,58	89,87	115	104,4	84,77	95,03	-	144,80	130,81	130,81	117,93
6	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)				81	82	84	86	88	83,7	84,5	88,46	93,8	92,33	103,33	103,05	105,31	105,31	104,92
7	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				6	9	10	10	10	1	17	13	10	50	16,67	188,89	130,00	130,00	500,00
8	Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)				1971	2050	2150	2175	2200	1984	1933	1970	2021	2045	100,66	94,29	91,63	91,63	92,95
9	Kecukupan Protein (gram/kapita/hari)				54,7	55,5	57	57,1	57,2	54,7	56,8	61,4	65,1	63,47	100,00	102,34	107,72	107,72	110,96
10	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas 1				3	5	5	5	5	4	5	5	5	18	133,33	100,00	100,00	100,00	360,00
11	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman di Konsumsi (Persen)				90,77	90,77	91	91,5	92	91,21	95,35	95,35	102,11	93	100,48	105,05	104,78	104,78	101,09

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa terdapat 11 indikator kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tingkat ketercapaian indikator digambarkan melalui perbandingan antara target indikator pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun tersebut terhadap realisasinya. Tingkat keberhasilan indikator pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjukkan dengan rasio capaian lebih dari 90%. Rasio capaian paling kecil adalah indikator cakupan ketersediaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, yaitu sebesar 16,67% pada tahun 2021. Namun, indikator lainnya mencapai rasio lebih dari 100% pada tahun yang sama. Beberapa indikator tersebut antara lain, skor PPH konsumsi yang mencapai skor 83,7, kecukupan konsumsi energi (kkal/kapita/hari), kecukupan konsumsi protein (gram/kapita/hari), cakupan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi, serta penaganan kerawanan pangan pada daerah yang terindikasi rawan pangan prioritas 1 yang rasio antara target dan realisasi mencapai 133,33%.

Realisasi capaian indikator cakupan ketersediaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dengan rasio target dan realisasi mencapai 188,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mengatasi kendala yang terjadi pada tahun 2021. Adapun indikator lainnya memiliki nilai perbandingan lebih dari 91% hingga pada tahun 2025.

Faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi tersebut, yaitu perencanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, tersedianya SDM yang terampil dan kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal untuk terlaksananya program/kegiatan yang efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan mengacu pada pihak atau golongan masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari layanan, program, dan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Rumah tangga/masyarakat umum

2. Kelompok rentan pangan dan gizi : ibu hamil. Ibu menyusui, balita, lansia, masyarakat miskin
3. Kelompok Petani, Peternak, Nelayan yang yang berperan langsung dalam penyediaan bahan pangan di masyarakat;
4. Lembaga Pelayanan Publik / Lembaga Masyarakat (sekolah, posyandu, lumbung pangan masyarakat, BUMDes, koperasi desa, dan lainnya)
5. Pelaku usaha distribusi dan perdagangan pangan yang terdiri atas pedagang, distributor, dan pelaku usaha pangan lainnya
6. Pelaku usaha UMKM olahan pangan lokal

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Dinas Ketahanan Pangan bermitra dengan beberapa pihak, baik unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun unsur non pemerintah. Adapun mitra Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut.

1. Perangkat daerah terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Bank Kaltimtara Cabang Tenggarong
3. Bulog Wilayah Divisi Regional Kalimantan Timur
4. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas
5. Kontak Tani dan Nelayan Andalan
6. Kelompok Wanita Tani
7. Tim Penggerak PKK

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi

dan pelaporan di bidang ketahanan pangan. Penyelenggaraan tugas-tugas tersebut juga mengalami permasalahan yang dapat diatasi melalui penyusunan langkah-langkah strategis sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang optimal. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan menurut aspek ketahanan pangan, yaitu :

1. Situasi Ketersediaan Pangan
2. Situasi Keterjangkauan/Akses Pangan
3. Situasi Pemanfaatan Pangan

2.2.1.1. Situasi Ketersediaan Pangan

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih di bawah satu juta jiwa, dengan pertumbuhan setiap tahun meningkat dengan stabil, dengan rata-rata pertumbuhan 1,24 persen per tahun. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 789.767 jiwa (Tabel 2.7). Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tenggarong, Loa Janan dan Tenggarong Seberang.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Petumbuhan (%)
2019	786.122	2,18
2020	729.382	-7,22
2021	733.626	0,58
2022	738.189	0,62
2023	788.113	6,76
2024	789.767	4,36

Sumber : Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2025

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sejumlah 788.113 jiwa. Jumlah penduduk ini diproyeksikan akan mencapai 845.621 jiwa pada awal periode 2025 dan mencapai angka lebih dari satu juta jiwa yakni 1.068.530 jiwa di periode 2030. Angka ini akan terus meningkat hingga akhir periode RPJPD pada 2045. Peningkatan pertumbuhan cenderung lebih tinggi di awal periode, dengan persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 26,36 persen (2030). Jumlah penduduk terus tumbuh, tetapi dengan akselerasi yang menurun, sampai pada akhir

proyeksi masih terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 5,85 persen (2045) dan diprediksi jumlah penduduk absolut akan mencapai 1.355.845 jiwa.

Tabel 2.8. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
788.113	845.621	1.068.530	1.193.808	1.280.938	1.355.845

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

Kondisi daya dukung lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melampaui batas atau *overcapacity*. Hasil akhir perhitungan dalam dokumen DDLH menyatakan bahwa daya dukung lahan masih memenuhi kebutuhan lahan per jiwa di setiap kecamatan. Namun, Dokumen DDDT-LH menyimpulkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat berswasembada pangan. Hal ini disebabkan karena daya dukung wilayah pertanian (kemampuan untuk menyediakan lahan pangan secara berkelanjutan di suatu wilayah) hanya menunjukkan angka 0,25, jika daya dukung kurang dari 1 berarti lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehingga perlu adanya produksi atau intervensi.

Tabel 2.9. Daya Dukung Wilayah Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara

Luas Panen (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Fisik Minimum (Kg/Kapita/Tahun)	Produktivitas Padi (Kg/Ha)	Daya Dukung Wilayah Pertanian
28,33	786,123	650	4.511	0,25

Sumber : Dokumen DDDT-LH Tahun 2020 (RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045)

Ketersediaan pangan adalah kondisi dimana pangan tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik jumlah maupun keragaman jenis pangan yang cukup untuk mendukung kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 2020–2024 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Untuk ketersediaan pangan Utama yang terutama beras, dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Data Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama dan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Tahun 2020-2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

DATA PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA DAN SKORE POLA PANGAN KETERSEDIAAN TAHUN 2020 - 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	128,8	128,72	118,00	118,46	102,95	108,65
2	Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan	95,56	96,48	93,66	92,83	94,12	95,50

Jumlah Pangan utama yang tersedia (Beras) antara jumlah yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan penduduk, maka tingkat ketersediannnya cenderung menurun. Meskipun produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk terbesar di Kalimantan Timur, namun karena Pangan yang tersedia untuk mensuplai di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tahun 2025, masih terdapat kelebihan ketersediaan sebesar 8,65 persen dari kebutuhan.

Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) cenderung mengalami penurunan. Pada 2021 skor PPH tercatat 97,41 (100,96% dari target), turun menjadi 93,66 pada 2022 (97,08%), kemudian melemah lebih lanjut ke 90,43 pada 2023 (92,38%). Tahun 2024 sedikit membaik ke 94,12 (95,47%), dan pada tahun 2025 naik lagi menjadi 95,5%, namun masih belum mencapai target ideal. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya keragaman pangan yang dikonsumsi, meskipun energi dan protein tersedia dalam jumlah relatif memadai

Pada indikator ketersediaan energi (ideal 2.400 kkal/kapita/hari), tahun 2021 masih berada di bawah target dengan capaian 2.342 kkal/kapita/hari (99,03%). Kondisi ini membaik di 2022 dengan capaian 2.458 kkal/kapita/hari (103,63%) dan meningkat signifikan pada 2023 hingga 2.779 kkal/kapita/hari (116,86%). Namun, pada 2024 ketersediaan energi menurun menjadi 2.546

kkal/kapita/hari meski masih melampaui target (106,66%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas energi pangan relatif tersedia, tetapi kestabilannya belum konsisten dari tahun ke tahun.

Untuk ketersediaan protein (ideal 63 gr/kapita/hari), capaian pada 2021 sebesar 89,87 gr (113,70%) sudah melampaui target, bahkan melonjak tajam pada 2022 hingga 115 gr (144,80%). Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 104,4 gr (130,81%), dan pada 2024 turun lebih jauh ke 84,77 gr (105,69%). Meskipun masih di atas target, tren penurunan dua tahun terakhir menunjukkan adanya potensi kerentanan terhadap keberlanjutan konsumsi protein masyarakat.

Tabel 2.11. Ketersediaan Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023- 2024

Indikator	Ideal	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	2.400	2.342	2.458	2.779	2.546
Target		2.365	2.372	2.378	2.387
Capaian (%)		99,03	103,63	116,86	106,66
Ketersediaan Protein (gr/kap/hari)	63	89,87	115	104,4	84,77
Target		79,04	79,42	79,81	80,21
Capaian (%)		113,70	144,80	130,81	105,69
Skor PPH	100	97,41	93,66	90,43	94,12
Target		96,48	96,48	97,89	98,59
Capaian (%)		100,96	97,08	92,38	95,47

Sumber : Dokumen Neraca Bahan Makanan Tahun 2021-2024

Secara umum, meski capaian energi dan protein menunjukkan ketersediaan yang cukup baik bahkan melebihi target, tren penurunan protein dan skor PPH menjadi perhatian serius. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas pangan, di mana keragaman ketersediaan pangan belum sepenuhnya mendukung pola pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Tabel 2.12 menyajikan data ketersediaan pangan menurut kelompok bahan makanan di Kutai Kartanegara tahun 2023–2024 yang menunjukkan dominasi pada padi-padian. Tahun 2023, ketersediaannya mencapai 1.279 kkal/kapita/hari dengan skor PPH 25,00, dan meningkat pada 2024 menjadi 1.457 kkal/kapita/hari dengan skor tetap 25,00. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem ketersediaan pangan daerah masih bertumpu pada beras dan hasil padi-padian sebagai sumber energi utama.

Ketersediaan pangan hewani cukup signifikan pada 2023 sebesar 403 kkal/kapita/hari dengan skor PPH 24,00, namun mengalami penurunan pada 2024 menjadi 270 kkal/kapita/hari dengan skor 22,47. Penurunan ini perlu dicermati karena pangan hewani merupakan sumber protein berkualitas yang berpengaruh besar terhadap perbaikan gizi masyarakat.

Minyak dan lemak juga mengalami penurunan, dari 610 kkal/kapita/hari (skor 5,00) pada 2023 menjadi 376 kkal/kapita/hari dengan skor yang tetap 5,00 pada 2024. Kondisi ini dapat memengaruhi kepadatan energi pangan yang tersedia.

Tabel 2.12. Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2024

No	Kelompok Bahan Makanan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Energi (kkal/kap/hr)	Skor PPH	Energi (kkal/kap/hr)	Skor PPH
1	Padi-padian	1.279	25,00	1.457	25,00
2	Umbi-umbian	43	0,89	70	1,47
3	Pangan Hewani	403	24,00	270	22,47
4	Minyak dan Lemak	610	5,00	376	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	24	0,51	1	0,01
6	Kacang-kacangan	212	10,00	132	10,00
7	Gula	98	2,03	106	2,22
8	Sayuran dan Buah	110	22,09	134	27,95
9	Lain-lain	0	0	0	0

Sumber : Laporan Neraca Bahan Makanan, 2024

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada ketersediaan sayuran dan buah. Tahun 2023 ketersediaannya sebesar 110 kkal/kapita/hari (skor PPH 22,09) meningkat menjadi 134 kkal/kapita/hari dengan skor lebih tinggi, yakni 27,95 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kontribusi pangan nabati segar terhadap sistem ketersediaan pangan daerah.

Kelompok pangan lain seperti umbi-umbian meningkat dari 43 kkal/kapita/hari (skor 0,89) pada 2023 menjadi 70 kkal/kapita/hari (skor 1,47) pada 2024. Kacang-kacangan justru mengalami penurunan dari 212 kkal/kapita/hari (skor 10,00) menjadi 132 kkal/kapita/hari dengan skor tetap 10,00. Gula relatif stabil, yakni 98 kkal/kapita/hari pada 2023 menjadi 106 kkal/kapita/hari pada 2024, dengan skor PPH yang sedikit naik dari 2,03 ke 2,22. Sedangkan buah/biji berminyak kontribusinya sangat kecil dan cenderung menurun drastis, dari 24 kkal/kapita/hari pada 2023 menjadi hanya 1 kkal/kapita/hari pada 2024.

Secara keseluruhan, ketersediaan pangan di Kutai Kartanegara masih menunjukkan ketergantungan besar pada padi-padian, sementara kontribusi pangan hewani, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak cenderung menurun. Meskipun ada tren positif pada sayuran, buah, dan umbi-umbian, ketidakseimbangan ketersediaan pangan ini berdampak pada rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Artinya, meskipun energi total tercukupi, kualitas dan keberagaman pangan yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan.

Aspek ketersediaan pangan mencakup produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Subsistem ini berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik dari sisi jumlah, keragaman maupun keamanannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pasal 4 menyebutkan bahwa sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan daerah. Kontribusi peningkatan produksi terbesar pada kelompok padi-padian berasal dari jagung, yaitu dengan laju 72,5%. Beras sebagai pangan pokok juga mengalami peningkatan produksi, yaitu sebesar 8,2% (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Produksi Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2024

Jenis Pangan	Produksi (Ton)						Laju (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Padi-Padian							
Gabah	143.003	121.203	110.940	104.442	105.026	115.104	-3,9
Beras	84.911	71.221	66.988	63.253	61.697	105.561	8,2
Jagung	9.751	18.080	860	3.147	6.074	6.889	72,5
Makanan Berpati							
Ubi jalar	444	4.785	6.444	8.087	5.405	4.734	198,5
Ubi kayu	20.375	23.769	22.244	18.687	16.928	14.056	-6,4
Umbi-umbian lainnya	201	-	-	-	-	28	-
Gula/ *Sugar*							
Gula mangkok	149	305	361	381	155	395	44,8
Buah/Biji Berminyak							
Kacang tanah berkulit	291	287	502	663	300	-	-
Kacang tanah lepas kulit	306	287	286	378	171	163	-6,8
Kedelai	56	-	13	49	22	7	-
Kacang hijau	75	42	106	154	30	30	14,6
Kelapa daging	88.807	5	-	-	10.477	-	-
Kopra	5.453	165	150	601	1.658	3.457	95,8

Jenis Pangan	Produksi (Ton)						Laju (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Buah-buahan							
Alpokat	67	78	82	77	64	4.467	-
Jeruk siam	719	881	2.103	2.641	1.029	148	8,0
Duku	240	2.374	2.052	177	182	237	163,4
Durian	4.766	7.319	4.343	2.475	2.181	4.879	16,3
Jambu biji	584	672	883	887	293	273	-5,4
Jambu air	-	560	783	752	453	259	-
Mangga	2.526	2.836	1.537	3.082	857	1.335	10,1
Nanas	29.574	15.228	20.399	53.093	28.871	14.487	10,1
Pepaya	8.005	15.716	5.487	3.995	2.137	1.416	-15,2
Pisang	13.890	21.130	37.487	15.387	15.132	8.526	5,0
Rambutan	2.349	21.287	3.591	4.470	2.094	2.889	146,4
Salak	484	1.691	3.140	1.230	978	380	38,5
Sawo	710	3.824	2.791	462	396	276	56,7
Melon	234	-	78	40	85	353	-
Semangka	4.788	5.134	3.521	1.914	1.243	1.400	-18,4
Belimbing	298	375	461	420	229	282	3,5
Manggis	109	406	337	81	95	193	60,0
Nangka/cempedak	6.234	10.482	5.610	21.897	3.139	5.590	39,3
Sirsak	198	816	345	255	256	174	-3,8
Sukun	456	756	779	635	168	175	-
Lemon	-	-	-	66	76	83	-
Jeruk besar/pamelo	-	17	96	16	33	29	-
Lengkeng	-	-	-	537	52	99	-
Buah naga	-	4.090	12.381	11.638	10.652	1.450	-
Jeruk nipis	-	-	-	-	-	1.409	-
Sayur-Sayuran							
Bawang merah	28	39	96	26	54	47	41,4
Ketimun	4.477	5.884	8.219	6.225	6.262	4.233	3,0
Kacang panjang	3.469	3.776	4.723	3.465	3.046	2.222	-6,49
Tomat	3.656	2.524	3.385	2.585	3.653	2.188	-3,8
Cabe besar/tw/teropong	4.599	1.927	1.959	3.047	1.514	701	-21,0
Cabe keriting	-	-	-	-	1.514	1.705	-
Cabe rawit	-	3.252	3.926	3.794	3.169	3.852	-
Terong	4.332	4.922	5.844	4.659	6.052	4.047	1,8
Petsai/ sawi	957	1.002	1.192	1.108	913	731	-4,2
Bawang daun	76	700	87			87	-
Kangkung	1.519	2.095	2.094	2.106	2.481	1.439	2,8
Labu siam	17	-	-	9	-	-	-
Buncis	1.943	2.899	3.043	2.172	2.728	1.603	2,0
Bayam	761	9.262	9.053	1.133	842	521	192,7
Kembang kol	32	195	83	57	52	55	83,5
Jamur tiram	-	-	483	2	103	100	-

Jenis Pangan	Produksi (Ton)						Laju (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Melinjo	290	641	1.770	1.322	283	151	29,3
Petai	213	429	758	386	159	235	23,6
Jengkol	97	123	235	200	72	42	-0,5
Selada	-	-	-	-	-	557	-
Seledri	-	-	-	-	-	39	-
Lainnya (oyong, kecipir, pare, pakis)	-	-	-	-	-	558	-
Daging							
Daging sapi	990	394	538	571	534	570	-3,4
Daging kerbau	3	9	11	3	3	3	30,0
Daging kambing	57	15	23	32	30	31	3,2
Daging babi	175	18	37	8	8	15	5,0
Daging ayam buras	1.502	408	437	414	446	216	-23,0
Daging ayam ras	9.939	11.836	11.924	12.760	9.343	20.351	23,6
Daging itik	18	28	-	25	31	31	-
Jeroan semua jenis	1.524	1.314	-	-	-	74	-
Telur							
Telur ayam buras	944	274	2.745	260	280	272	149,0
Telur ayam ras	1.664	710	8.671	1.551	3.187	3.135	217,1
Telur itik	229	361	3.610	324	399	340	175,0
Ikan							
Tuna/Cakalang/Tongkol	381	339	418	414	477	447	4,0
Kakap	2.439	3.919	299	260	3.442	3.442	235,8
Bawal	1.038	1.284	170	1.570	2.007	2.007	157,6
Teri	4.780	5.786	635	7.212	7.460	7.460	194,2
Kembung	825	969	838	870	802	802	0,0
Tenggiri	641	1.031	118	1.170	943	943	168,9
Bandeng	4.379	6.407	731	6.905	571	571	142,1
Belanak	3.326	5.257	484	3.198	1.224	1.224	93,3
Mujair	1.682	1.868	265	2.551	2.250	2.250	155,2
Ikan mas	13.239	14.903	152	16.169	45	45	207,0
Lele	559	1.476	16	1.630	545	545	201,7
Patin	9.625	12.579	139	13.956	2.736	2.736	195,8
Nila	19.445	184	222	21.194	1.079	1.079	185,4
Kerapu	520	196	480	474	620	620	22,4
Gurami	6	21	21	71	20	29	92,2
Udang	9.053	39.316	19.213	21.094	18.463	17.673	55,2
Rajungan dan kepiting	3.930	419	309	263	442	442	-12,5
Kekerangan	-	104	112	107	132	132	-
Cumi-cumi, sotong, gurita	6	55	37	37	90	70	17,3
Rumput laut	7.590	11.280	128	12.178	10.395	10.395	186,9
Kuwe	-	385	371	378	499	499	-
Baronang	-	2.530	138	1.171	1.268	1.268	-

Jenis Pangan	Produksi (Ton)						Laju (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ekor kuning	-	309	90	92	137	137	-
Selar	-	248	268	253	256	256	-
Gabus	-	10.276	126	13.235	3.396	3.396	-
Tawes	-	596	80	99	617	617	-
Manyung	-	-	-	-	617	285	-
Layur	-	-	-	-	285	51	-
Pari	-	-	-	-	51	175	-
Belut/sidat	-	-	-	-	175	143	-
Sepat/baung/betook	-	-	-	-	855	1.511	-
Ikan lainnya	52.519	48	-	-	28.903	38.690	-

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka, Dinas Ketahanan Pangan

Sumber karbohidrat dapat berasal dari makanan berpati. Situasi produksi makanan berpati secara keseluruhan mengalami secara keseluruhan peningkatan sebesar 96%. Komoditas makanan berpati yang di produksi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ubi jalar dan ubi kayu. Komoditas ubi jalar mengalami peningkatan produksi dengan laju 198,4%, sedangkan ubi kayu/singkong mengalami penurunan sebesar 6,2%.

Gula mangkok merupakan salah satu komoditas sektor perkebunan yang dihasilkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju peningkatan produksi gula mangkok pada periode 2019 – 2024 sebesar 44,8%. Adapun total produksi gula mangkok pada tahun 2024 mencapai 395 ton.

Terdapat beberapa komoditas buah/biji berminyak yang diproduksi, antara lain kacang tanah berkulit, kacang tanah lepas kulit, kedelai, kacang hijau, kelapa daging dan kopra. Secara umum, beberapa komoditas tersebut mengalami peningkatan, yaitu kacang hijau (14,6%) dan kopra (95,8%). Sementara itu, produksi kacang tanah lepas kulit pada tahun 2019 – 2024 mengalami laju penurunan produksi sebesar 6,8%.

Produksi buah-buahan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar 50.809 ton, secara umum menurun 28,2% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan total produksi yang mencapai 70.695 ton untuk seluruh komoditas. Terdapat tiga komoditas buah yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap total produksi buah tahun 2024, yaitu nanas (14.487 ton), pisang (8.526 ton), dan nangka/cempedak (5.590 ton).

Kelompok sayur-sayuran secara umum juga mengalami penurunan produksi pada tahun 2023 – 2024, yaitu sebesar 23,7% dari total produksi pada tahun 2023 mencapai 32.897 ton menjadi 25.113 ton di tahun 2024 untuk

seluruh komoditas sayur-sayuran. Tiga komoditas sayuran yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah ketimun (4.233 ton), terong (4.047 ton), dan cabe rawit (3.852 ton).

Pangan hewani yang diproduksi di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari daging merah, daging unggas, ikan dan telur, sementara itu aneka susu tidak tercatat dalam data produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Produksi daging sapi dan daging kambing secara berturut-turut sebesar 570 ton dan 31 ton pada tahun 2024. Produksi daging sapi mengalami penurunan selama periode 2019 – 2024 dengan laju rata-rata 3,4%. Daging ayam ras merupakan kontributor terbesar pada produksi kelompok daging tahun 2024, yaitu sebesar 20.351. Pada kelompok telur, terdapat peningkatan produksi total sebesar 180% tahun 2024. Secara rinci, jumlah telur yang dihasilkan sebesar 272 ton telur ayam buras, 3.135 ton telur ayam ras, dan 340 ton telur itik pada tahun 2024. Ikan yang diproduksi di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari ikan budidaya dan ikan perairan laut. Total produksi untuk semua komoditas perikanan pada tahun 2024 mencapai 9.940 Ton, meningkat 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yang tercatat sebesar 90.802 ton. Hal ini dikarenakan jenis ikan yang diproduksi dan tercatat pada tahun 2024 lebih beragam. Adapun secara rinci data produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Cadangan pangan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat atau ketidakpastian pasokan pangan. Cadangan pangan dapat berupa komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, dan gula yang disimpan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam periode tertentu. Selain berfungsi sebagai penyangga stabilitas harga dan pasokan, cadangan pangan juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan wilayah agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Tabel 2.14 menampilkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2024 berupa beras.

Tabel 2.14. Cadangan Beras Tahun 2019 – 2024

Periode	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ton)
Desember 2019	146,5
Desember 2020	0,0
Desember 2021	108,4
Desember 2022	88,2
Desember 2023	308,85
Desember 2024	308.16
Laju rata-rata (%)	24,23

Jumlah cadangan beras pemerintah pada periode Desember 2024 sebesar 308,68 ton dengan laju perkembangan rata-rata pada periode 2019 – 2024 sebesar 24,23%. Adapun pada periode Desember 2020 tidak tersedia stok akhir. Cadangan beras pada periode tersebut disalurkan pada keluarga/ masyarakat yang secara ekonomi terdapak wabah COVID-19. Pemantauan cadangan pangan diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah terjadinya krisis pangan, utamanya sebagai penyangga stabilitas harga dan pasokan. Jika dibandingkan dengan data produksi beras, cadangan beras pemerintah juga dapat dijadikan sebagai sumber untuk menyediakan beras bagi penduduk, selain dari impor.

Sesuai dengan Tata Cara Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2023, hasil perhitungan sesuai Rumus yang ada untuk Kabupaten Kutai Kartanegara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah minimal sebesar 154.4 Ton. Sesuai dengan tabel diatas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai akhir tahun 2024 yang tersedia sudah melebihi Cadangan minimal yang harus disediakan hampir mencapai 200 Persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, penyelenggaraan cadangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah melalui pengadaan, pengelolaan

(penyimpanan dan pemeliharaan), dan penyaluran. Adapun sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah di dalam peraturan tersebut adalah rumah tangga miskin, lanjut usia, masyarakat umum yang terkena dampak bencana (alam, non alam, dan sosial), serta anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kekurangan asupan gizi. Berdasarkan peraturan tersebut, pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN (Perum Bulog) dan BUMD. Adapun mekanisme penyaluran cadangan pangan, secara *top down* (atas perintah Bupati) dan *bottom up* (usulan dari kecamatan/ desa).

Tabel 2.15 berikut menunjukkan prognosa pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Prognosa pangan adalah upaya strategis dalam merencanakan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan di suatu wilayah. Analisis ini bertujuan untuk memproyeksikan potensi produksi, kebutuhan konsumsi, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Total ketersediaan di dalam analisis prognosa pangan diperoleh dari jumlah stok/cadangan awal, produksi, barang masuk/impor (dikoreksi dengan barang keluar/ekspor). Total kebutuhan diperoleh dari jumlah kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga. Dengan demikian, diperoleh neraca pangan dari selisih ketersediaan dan kebutuhan. Neraca Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 2.15. Prognosa Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Bahan Makanan	**Total Ketersediaan (Ton)**	**Total Kebutuhan (Ton)**	**Neraca (Ton)**
Beras	175.555	72.175	103.380
Jagung	18.408	511	17.897
Kedelai	115	24	91
Bawang merah	3.564	2.614	950
Bawang putih	2.261	2.266	-5
Cabe rawit	27.295	2.757	24.538
Cabe besar	5.921	994	4.927
Daging sapi	3.673	2.278	1.395
Daging ayam	30.752	21.500	9.252
Telur	14.895	11.215	3.680
Gula	7.225	5.769	1.456

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.15 menguraikan neraca pangan untuk 11 komoditas di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Dari 11 komoditas tersebut, 10 komoditas bernilai positif, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging ayam, telur, gula dan minyak goreng. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dari 10 komoditas tersebut baik untuk rumah tangga maupun non rumah tangga dapat diperoleh melalui produksi pangan wilayah, cadangan pangan, maupun impor. Neraca untuk komoditas bawang putih bernilai negatif. Artinya, kebutuhan bawang putih lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan pangan yang ada. Ketersediaan pangan dimungkinkan susut/hilang selama pasca panen. Dengan demikian, diperlukan adanya pengelolaan susut pangan (*food loss*) sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem pangan sekaligus menjaga ketersediaan pangan.

2.2.1.2 Situasi Keterjangkauan/Akses Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup sesuai kebutuhan gizi, baik melalui daya beli (akses ekonomi) maupun akses fisik (ketersediaan di sekitar lokasi). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menegaskan bahwa keterjangkauan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik itu pangan maupun non-pangan, yang diukur berdasarkan pengeluaran, yaitu garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakcukupan dalam konsumsi pangan. Dalam jangka panjang, kekurangan baik dari segi jumlah maupun kualitas konsumsi pangan dapat memicu masalah gizi.

Penduduk miskin adalah mereka dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara semakin meningkat seiring bertambahnya waktu (tahun). Adapun Garis Kemiskinan tahun 2024 sebesar 682.490 rupiah/kapita/bulan (BPS Kutai Kartanegara 2025). Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3. Garis kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2024

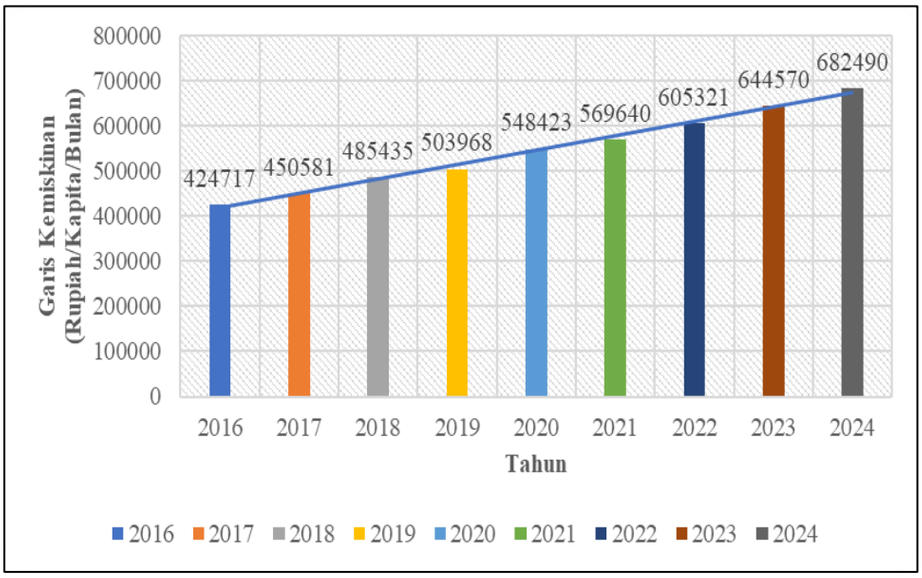

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2024

Gambar 2.4 dibawah menunjukkan situasi kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 – 2024 berdasarkan persentase penduduk miskin. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2020 – 2022 memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Persentase kemiskinan pada 2024 (7,61%) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2023 (7,96%), menunjukkan adanya pemulihan perekonomian. Adapun laju penurunan persentase penduduk miskin periode 2019 – 2024 sebesar 4%, menuju target tingkat kemiskinan tahun 2045 sebesar 3,19%

Gambar 2.4. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019-2024

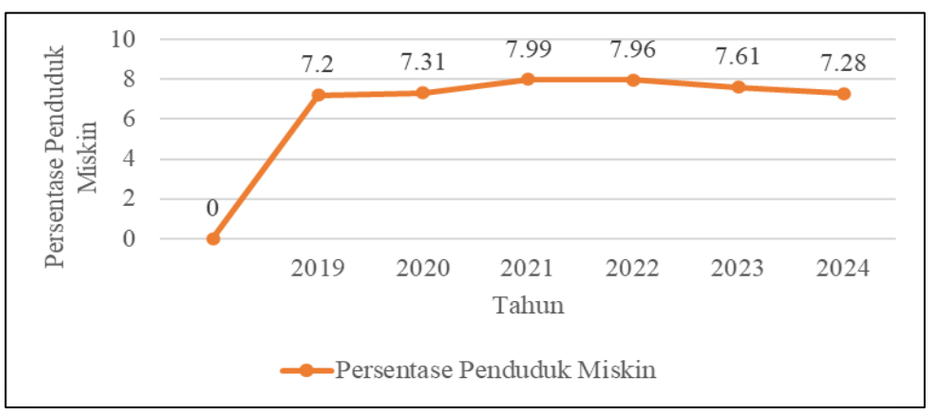

Selain kemiskinan, akses terhadap pangan juga ditentukan oleh tingkat pendapatan atau daya beli serta stabilitas pangan. Tingkat pendapatan dapat tercerminkan oleh pengeluaran pangan sebagai indikator proksi. Tabel 2.16 menunjukkan pangsa pengeluaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.16. Pangsa pengeluaran penduduk tahun 2019-2024

Tahun	Pangsa Pengeluaran (%)	
	Pangan	Non Pangan
2019	48.73	51.27
2020	48.37	51.63
2021	46.52	53.48
2022	48.92	51.08
2023	47.38	52.62
2024	49.87	50.13
Laju (%)	0.54%	-0.38%

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2021-2025

Data pangsa pengeluaran penduduk Kutai Kartanegara tahun 2019–2024 memperlihatkan tren fluktuatif. Pangsa pangan turun hingga 46,52% pada 2021, tetapi meningkat kembali menjadi 49,87% pada 2024. Menurut Hukum Engel, semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran pangan akan menurun. Namun, kenaikan di periode terakhir mengindikasikan adanya tekanan daya beli akibat kenaikan harga pangan atau stagnasi pendapatan. Berdasarkan klasifikasi BPS, proprosi pengeluaran per kapita per bulan:

- <50% → relatif sejahtera
- 50–60% → menengah rentan
- >60% → miskin/rentan tinggi

Dengan porsi pangan sekitar 46–50%, masyarakat Kutai Kartanegara berada di ambang batas antara kategori sejahtera dan menengah rentan. Artinya, kondisi kesejahteraan masih rapuh: guncangan harga pangan atau penurunan pendapatan berpotensi segera mendorong rumah tangga kembali ke kategori rentan pangan.

Tabel 2.17. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Tahun 2023-2024

Kelompok Komoditas	Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan					Laju (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Makanan						
Padi-padian	11.42	10.52	10.06	10,04	11,56	0.7
Umbi-umbian	0.67	0.82	0.95	1	0,83	6.6
Ikan/udang/cumi/kerang	11.41	11.45	12.16	11,96	10,63	-1.6
Daging	3.9	4.11	4.64	5	5,51	9.1
Telur dan susu	6.5	6.24	6.16	5,6	4,75	-7.4
Sayur-sayuran	6.76	8.34	8.5	8,08	7,8	4.2
Kacang-kacangan	1.98	2.13	1.95	1,98	1,89	-1.0
Buah-buahan	4.83	4.92	4.09	4,62	6,79	11.2
Minyak dan kelapa	2.43	2.48	3.79	2,6	2,24	2.4
Bahan minuman	3.22	3.42	3.17	3,12	2,78	-3.4
Bumbu-bumbuan	2.07	2.26	2.57	2,61	2,37	3.8
Konsumsi lainnya	2.35	2.15	2.44	2,16	1,86	-5.1
Makanan dan minuman jadi	30.74	29.55	27.38	29,48	30,06	-0.4
Rokok	11.74	11.61	12.13	11,75	10,94	-1.7
Jumlah makanan	**48.73**	**48.37**	**48.92**	**47,38**	**49,87**	**0.6**
Non Makanan						
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	62.47	60.08	59.43	54,46	56,58	-2.3
Aneka barang dan jasa	19.44	20.52	18.3	18,7	19,76	0.6
Pakaian, alas kaki, dan penutup kepala	4.99	5.05	4.53	4,1	4,28	-3.5
Barang tahan lama	4.9	4.95	8.62	11,36	10,65	25.2
Pajak, pungutan, dan asuransi	5.68	7.12	7.55	6,87	6,95	5.9
Keperluan pesta dan upacara	2.52	2.28	1.57	4,51	1,79	21.6
Jumlah bukan makanan	**51.27**	**52.63**	**51.08**	**52,62**	**50,13**	**-0.5**
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2021-2025

Tabel 2.17 diatas menunjukkan pangsa pengeluaran terhadap rokok menunjukkan bahwa alokasi rumah tangga yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli pangan bergizi beralih ke barang yang tidak memiliki nilai gizi atau bahkan merugikan kesehatan. Ketergantungan rokok sebagai proporsi pengeluaran terbesar dapat berdampak pada penurunan kualitas

konsumsi pangan. Dampak jangka panjangnya, konsumsi rokok yang tinggi tidak hanya meningkatkan risiko masalah kesehatan, tetapi juga menambah beban ekonomi dan mengurangi produktivitas masyarakat.

Pengeluaran makanan dan minuman jadi mengalami penurunan selama 2019 – 2024, meskipun demikian pada periode 2022 – 2023 mengalami peningkatan dan masih menduduki proporsi pengeluaran banyak terbesar untuk golongan makanan. Hal ini menunjukkan pergeseran tren masyarakat yang lebih banyak membeli makanan dan minuman jadi dibandingkan membuat sendiri makanan di rumah. Makanan dan minuman jadi merupakan kontributor terbesar gula, garam dan lemak yang berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan, terutama penyakit tidak menular (PTM).

Pangan yang jumlah pengeluarannya mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, antara lain kelompok padi-padian, umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, buah-buahan dan bumbu. Rata-rata jumlah pengeluaran kelompok non pangan cenderung mengalami penurunan sebanyak 0,5% sejak tahun 2020 hingga 2024.

Harga pangan dan ketahanan pangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara/wilayah untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya. Ketika harga pangan meningkat drastis atau pasokan terganggu, kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi yang paling terdampak. Tabel 18 menampilkan harga bahan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2025.

Tabel 2.18. Stabilitas Harga Pangan Tahun 2022 – 2025

Jenis Pangan	**Stabilitas Harga Pangan**							
	2022		**2023**		**2024**		**(Jan-Juni) 2025**	
	Harga (Rp)	**Ket**	**Harga (Rp)**	**Ket**	**Harga (Rp)**	**Ket**	**Harga (Rp)**	**Ket**
Beras Medium	11353	Stabil	13381	Stabil	14468	Stabil	15320	Stabil
Daging Ayam Broiler	37053	Tidak Stabil	38871	Stabil	38975	Stabil	40091	Stabil
Telur Ayam Ras	54880	Stabil	33862	Stabil	28964	Stabil	29503	Stabil
Bawang	37869	Tidak	33248	Tidak	38259	Stabil	39908	Stabil

Jenis Pangan	Stabilitas Harga Pangan							
	2022		2023		2024		(Jan-Juni) 2025	
	Harga (Rp)	Ket	Harga (Rp)	Ket	Harga (Rp)	Ket	Harga (Rp)	Ket
Merah		Stabil		Stabil				
Bawang Putih	-	-	34165	Tidak Stabil	39343	Stabil	43062	Stabil
Cabai Merah	65384	Tidak Stabil	51429	Stabil	39986	Stabil	56322	Tidak Stabil
Minyak Goreng Curah	14250	Stabil	15643	Stabil	15786	Stabil	18320	Tidak Stabil
Gula Pasir	14573	Stabil	15676	Stabil	18932	Stabil	19429	Stabil
Tepung Terigu	11500	Tidak Stabil	12894	Stabil	11450	Stabil	12016	Stabil
Daging Sapi	135960	Stabil	142305	Stabil	136964	Stabil	138941	Stabil
Ikan	-	-	39600	Stabil	36571	Stabil	41196	Stabil

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.18 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas strategis seperti beras medium, telur ayam ras, gula pasir, ikan, dan daging sapi relatif stabil dari tahun ke tahun. Namun, sejumlah komoditas protein dan hortikultura masih sering berfluktuasi tajam. Daging ayam broiler, telur ayam ras, bawang merah, dan cabai merah tercatat beberapa kali tidak stabil terutama pada 2022–2023. Pada 2025, cabai merah dan minyak goreng curah kembali menunjukkan ketidakstabilan harga. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun ketersediaan pangan pokok relatif aman, komoditas pangan sensitive khususnya protein hewani dan sayuran strategis masih rentan terhadap gejolak harga yang dapat memengaruhi keterjangkauan pangan rumah tangga.

Situasi kerawanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil pemetaan berupa Peta FSVA yang disusun menggunakan dengan 6 Indikator berikut :

1. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa
2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga
3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa
4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara
5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa
6. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.

Sesuai dengan peta FSVA yang telah disusun, diperoleh Gambaran Kondisi Kerawanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pada Gambar 2.5 Situasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024

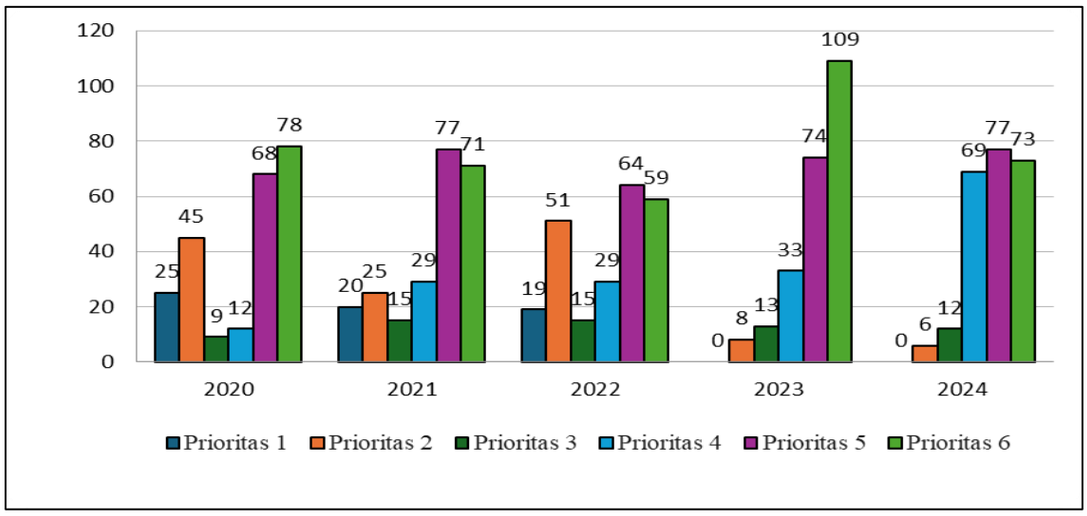

Sumber: Buku FSVA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Hasil menunjukkan bahwa jumlah desa rawan pangan pada tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif. Desa yang masuk dalam prioritas 1-3 (desa rentan pangan) pada tahun 2020 mencapai 79 desa. Jumlah terebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 60 desa dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 85 desa. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan jumlah desa meningkat secara signifikan. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 21 desa rentan pangan yang termasuk dalam prioritas 2 (8 desa) dan 3 (13 desa), serta tidak terdapat desa dengan kategori sangat rentan pangan (prioritas 1). Data desa rentan pangan tersebut kembali mengalami penurunan jumlah pada tahun 2024 menjadi 18 desa yang termasuk prioritas 2 dan prioritas 3. Tabel 2.19 menyajikan perkembangan jumlah desa sangat rentan pangan (prioritas 1) desa Rentan rawan pangan (prioritas 2) dan desa agak rentan rawan pangan (prioritas 3)

Tabel : 2.19 Data Daerah Rentan Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 - 2024

NO	KATEGORI	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PRIORITAS 1 (SANGAT RENTAN PANGAN)	25	20	19	0	0
2	PRIORITAS 2 (RENTAN RAWAN PANGAN)	45	25	51	8	6
3	PRIORITAS 3 (AGAK RENTAN RAWAN PANGAN)	9	15	15	13	12
	TOTAL	79	60	85	21	18

Prevalensi Kekurangan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment* atau PoU) merupakan salah satu indikator keterjangkauan pangan. PoU mengukur persentase populasi yang konsumsi energinya berada di bawah kebutuhan minimum untuk menjalani kehidupan aktif dan sehat. Indikator ini berkaitan dengan keterjangkauan ekonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses pangan yang cukup secara kuantitas, sekaligus sebagai indikator awal yang mengungkap kemungkinan adanya kerawanan pangan dari sisi aksesibilitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik RI, PoU Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar 14,3%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,34%. Angka tersebut kemudian meningkat hingga 11,14% pada tahun 2020; 14,41% pada tahun 2021 dan 18,52% pada 2022. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 tercatat sebesar 10,59%, termasuk dalam kategori masalah sedang (*moderate*). Adapun PoU Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 semakin mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan nilai 8,06%, namun demikian PoU Kabupaten Kutai Kartanegara jauh lebih tinggi dari PoU Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,4. Kutai Kartanegara berada pada urutan tertinggi ke 4 di Kalimantan Timur. Laju rata-rata PoU pada periode 2018 – 2024 adalah sebesar -16,4%. Gambar 5 menampilkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 – 2024.

Gambar 2.6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2018-2024

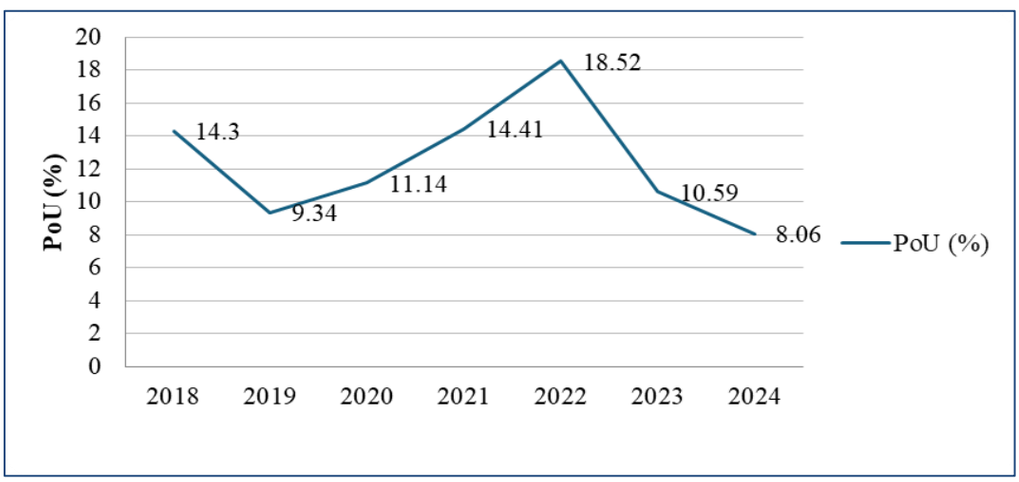

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

2.2.1.3 Situasi Konsumsi Pangan

Konsumsi energi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2018 hingga 2024 masih berada ambang batas bawah rekomendasi (2.100 kkal/kapita/hari). Struktur konsumsi masih timpang, dengan dominasi padi-padian dan minyak/lemak yang relatif berlebih, sementara umbi-umbian, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, serta pangan lain masih jauh di bawah standar. Tabel 2.20 menunjukkan Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2018-2024.

Perkembangan positif terlihat pada sayur, buah, dan pangan hewani yang cenderung meningkat dan mendekati bahkan melampaui ideal. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja dinas sudah mengarah pada perbaikan, tetapi tantangan utama tetap pada diversifikasi pangan lokal dan penurunan ketergantungan terhadap padi-padian untuk mencapai pola pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Tabel 2.20. Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2018-2024

Kelompok Pangan	Ideal	Konsumsi energi (kkal/kap/hari)							Laju (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Padi-padian	1050	1099	1096	1083	1060	1018	1043.1	1053	-0.70
Umbi-umbian	126	33	36	40	49	49	44.5	48	7.58
Pangan hewani	252	288	290	279	267	316	291	325	2.14
Minyak dan lemak	210	265	270	283	278	247	263.6	254	-0.69
Buah/ biji berminyak	63	6	11	10	7	8	13	9	8.33
Kacang-kacangan	105	51	46	54	52	57	63.5	65	4.58
Gula	105	102	100	105	107	91	99.6	94	-1.31
Sayur dan buah	126	74	81	90	77	99	105.1	127	11.93
Lain-lain	63	37	40	39	37	38	46.8	45	3.60
Total	2100	1956	1971	1984	1933	1922	1970	2021	0.55
Target					1971	2050	2150	2175	
Capaian (%)					98.07	93.76	91.63	92.92	

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Perkembangan positif terlihat pada sayur, buah, dan pangan hewani yang cenderung meningkat dan mendekati bahkan melampaui ideal. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja dinas sudah mengarah pada perbaikan, tetapi

tantangan utama tetap pada diversifikasi pangan lokal dan penurunan ketergantungan terhadap padi-padian untuk mencapai pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Pola konsumsi pangan dikelompokkan berdasarkan kuintil pengeluaran. Kuintil pengeluaran diperoleh dengan mengurutkan pengeluaran perkapita dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada umumnya, semakin tinggi kuintil maka semakin sejahtera penduduk tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi energi per kelompok pangan mempunyai perbedaan, yaitu semakin tinggi kuintilnya maka semakin tinggi juga jumlah konsumsinya. Adapun Konsumsi energi menurut kuintil pengeluaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7. Konsumsi Energi Menurut Kuintil Pengeluaran Penduduk Tahun 2024

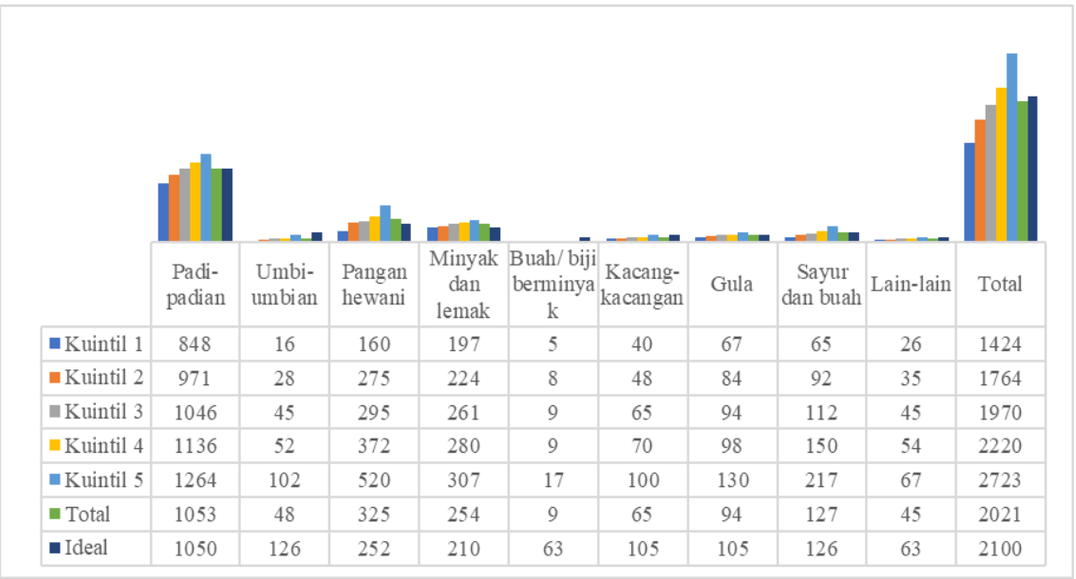

	Padi-padian	Umbi-umbian	Pangan hewani	Minyak dan lemak	Buah/ biji berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur dan buah	Lain-lain	Total
Kuintil 1	848	16	160	197	5	40	67	65	26	1424
Kuintil 2	971	28	275	224	8	48	84	92	35	1764
Kuintil 3	1046	45	295	261	9	65	94	112	45	1970
Kuintil 4	1136	52	372	280	9	70	98	150	54	2220
Kuintil 5	1264	102	520	307	17	100	130	217	67	2723
Total	1053	48	325	254	9	65	94	127	45	2021
Ideal	1050	126	252	210	63	105	105	126	63	2100

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Rata-rata konsumsi protein penduduk tahun 2018 – 2024 mencapai 59,9 gram, melebihi rekomendasi konsumsi protein menurut WNPG tahun 2012, yaitu 57 gram. Konsumsi protein per kelompok pangan dari tahun 2018 hingga 2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 2%. Kontribusi protein terbesar berada dari pangan hewani dan padi-padian. Kontribusi konsumsi pangan hewani meningkat 3,57% selama 7 tahun sedangkan kontribusi konsumsi kacang-kacangan meningkat 1,63%.

Perkembangan konsumsi protein Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21. Perkembangan Konsumsi Protein Tahun 2018 – 2024

Kelompok Pangan	Ideal	Konsumsi protein (gram/kap/hari)							Laju (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Padi-padian		24.9	25	24.9	24.5	23.1	23.9	23.9	-0.67
Umbi-umbian		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	5.56
Pangan hewani		23.8	24.1	23.4	22.3	26.8	25.8	28.9	3.57
Minyak dan lemak		-	0.1	0	0	0	0	0	0
Buah/ biji berminyak		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	16.67
Kacang-kacangan		5.1	4.5	5.3	5.2	4.9	5.4	5.6	1.63
Gula		-	0.1	0	0	0	0	0	0
Sayur dan buah		2.6	3	3.3	3	3.7	3.9	4.5	12.18
Lain-lain		1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	2.78
Total	57	58	58.5	58.8	56.8	60.6	61.4	65.1	2.05
Target					54.7	55.5	57	57.1	
Capaian (%)					103.84	109.19	197.72	114.01	

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.22 menampilkan perkembangan kuantitas konsumsi pangan hewani tahun 2018 – 2024. Tabel konsumsi pangan hewani 2018–2024 menggambarkan preferensi masyarakat Kutai Kartanegara yang sangat kuat terhadap ikan. Sepanjang periode tersebut, konsumsi ikan selalu menjadi yang tertinggi dibanding kelompok pangan hewani lain, bahkan meningkat tajam dari 83,5 pada 2018 menjadi puncaknya 96,3 pada 2023, meski sedikit menurun ke 94,5 pada 2024.

Tabel 2.22. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2018-2024

Kelompok Pangan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daging ruminansia	17.7	13.4	22.2	11.1	15.7	18.3	16.8
Daging unggas	24.4	21.3	22.2	22.7	24.9	30	33.2
Telur	21.3	21.2	22	21.7	21.9	0	20.4
Susu	10.4	8.6	8.2	8	8.5	0.5	6.7
Ikan	83.5	85	81.4	81.2	89.7	96.3	94.5

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Daging unggas menempati urutan kedua dalam preferensi, dengan tren peningkatan signifikan dari 21,3 pada 2020 menjadi 33,2 pada 2024. Telur relatif stabil di kisaran 20–22 sepanjang 2018–2024. Sementara itu, konsumsi daging ruminansia cenderung fluktuatif, sempat mencapai 22,2 pada 2020 namun menurun ke 16,8 pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa daging sapi dan sejenisnya bukan pilihan utama, kemungkinan karena faktor harga. Adapun susu konsumsinya paling rendah, menurun dari 10,4 pada 2018 menjadi hanya 6,7 pada 2024, bahkan nyaris nol pada 2023. Rendahnya konsumsi susu menunjukkan preferensi masyarakat yang belum kuat terhadap produk olahan susu sebagai sumber gizi.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk mengukur keseimbangan gizi dan keberagaman pangan yang dikonsumsi masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang pola konsumsi pangan tersebut. PPH didasarkan pada konsep triguna pangan, yaitu karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan menjadi syarat utama dalam mencapai gizi seimbang. Skor PPH menurut kelompok pangan menunjukkan bahwa kontribusi dari umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.23 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Tahun 2018-2024

Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal	Skor PPH						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	25	25	25	25	25	24.2	24.8	25
Umbi-umbian	2.5	1	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	1.2
Pangan hewani	24	24	24	24	24	24	24	24
Minyak dan lemak	5	5	5	5	5	5	5	5
Buah/ biji berminyak	1	0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Kacang-kacangan	10	5	4.4	5	5	5.4	6.1	6.1
Gula	2.5	3	2.4	2.4	2.5	2.2	2.4	2.2
Sayur dan buah	30	18	19.4	21	18.3	23.6	25	30
Total	100	81	81.3	83.7	81.1	85.5	88.6	93.8
Target				92.8	81	82	84	86
Capaian (%)				90.19	100.12	104.27	105.48	109.07

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Skor PPH konsumsi belum mencapai angka ideal untuk menunjukkan keanekaragam konsumsi pangan, yaitu PPH 100. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan gizi dan keberagaman pangan yang dikonsumsi masyarakat Kutai Kartanegara belum sepenuhnya memenuhi anjuran. Skor PPH konsumsi telah mencapai target pada periode 2021 hingga 2024. Konsumsi kelompok pangan seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan. Konsumsi sayur dan buah telah mencapai skor PPH ideal pada tahun 2024. Tabel 2.22 menyajikan data perkembangan skor PPH Kabupaten Kutai Kartanegara menurut kelompok pangan tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan kuintil pengeluaran, skor PPH konsumsi menunjukkan adanya peningkatan seiring bertambahnya kuintil pengeluaran. Artinya, semakin besar pengeluaran penduduk (sejahtera), semakin meningkat pula skor PPH konsumsinya, baik per kelompok pangan maupun skor PPH konsumsi total. Skor PPH konsumsi pada kuintil 4 dan 5 melebihi skor PPH total yang dicapai pada 2024 (skor PPH=93,8). Skor PPH termasuk dalam kategori baik (skor PPH konsumsi= 80) dicapai pada kuintil 2 – 5. Gambar 2.8 menyajikan skor PPH konsumsi menurut kuintil pengeluaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Gambar 2.8. Skor PPH Konsumsi menurut Kuintil Pengeluaran Tahun 2024

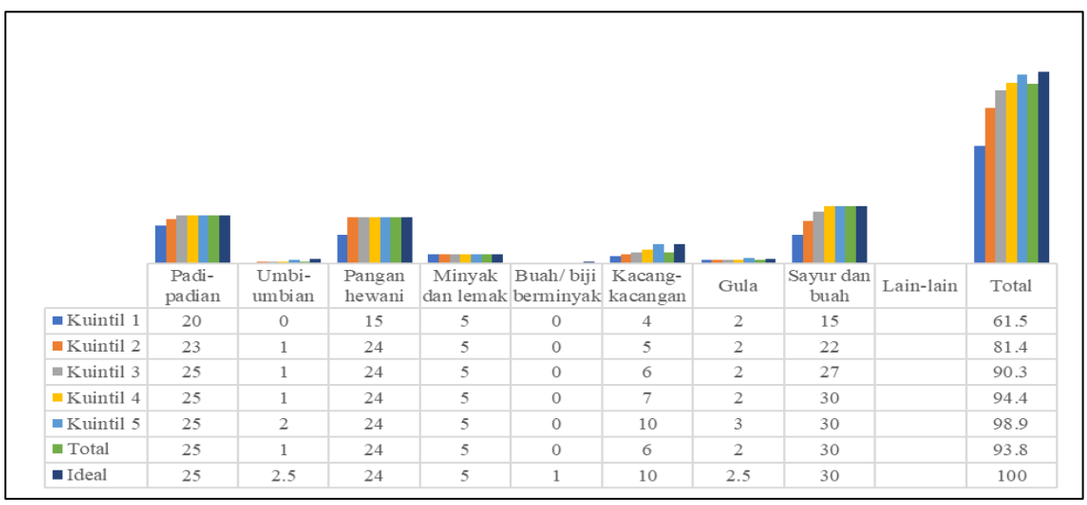

	Padi-padian	Umbi-umbian	Pangan hewani	Minyak dan lemak	Buah/ biji berminyak	Kacang-kacangan	Gula	Sayur dan buah	Lain-lain	Total
Kuintil 1	20	0	15	5	0	4	2	15		61.5
Kuintil 2	23	1	24	5	0	5	2	22		81.4
Kuintil 3	25	1	24	5	0	6	2	27		90.3
Kuintil 4	25	1	24	5	0	7	2	30		94.4
Kuintil 5	25	2	24	5	0	10	3	30		98.9
Total	25	1	24	5	0	6	2	30		93.8
Ideal	25	2.5	24	5	1	10	2.5	30		100

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Status gizi adalah *outcome* ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Tabel 2.24), menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* balita pada tahun 2024 sebesar 17,6% (kategori sedang), prevalensi *wasting* balita sebesar 9,3% (kategori sedang, dan prevalensi *underweight* balita sebesar 16,5% (tinggi). Berdasarkan Kementerian Sekretariat

Negara, jumlah keluarga risiko *stunting* (KRS) di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat mengalami peningkatan (152%), dimana pada tahun 2023 terdapat 2878 KRS, sementara pada tahun 2024 terdapat 7192 KRS. Adapun jumlah desa lokus *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 ialah sebanyak 29 desa. Desa lokus *stunting* adalah desa yang diprioritaskan untuk intervensi program percepatan penurunan *stunting*. Penetapan desa lokus *stunting* dilakukan sebagai bagian dari upaya terintegrasi sensitive maupun spesifik.

Tabel : 2.24. Status Gizi Balita Tahun 2022-2024

Status Gizi	Prevalensi (%)		
	2022	2023	2024
Stunting	26.4	27.1	17.6
Wasting	9	9.4	9.3
Underweight	17.5	25.1	16.5

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

2.2.1.4 Pemetaan Permasalahan Pangan Dinas Ketahanan pangan

Berdasarkan analisis situasi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun pemetaan permasalahan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menjadi alasan untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

Permasalahan utama dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan meliputi :

1. Masih Rendahnya Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan
2. Skore Pola Pangan Harapan Konsumsi masih Belum Optimal
3. Masih Terdapat Desa Rentan rawan Pangan

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.25 sebagai berikut :

Tabel.2.25
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih Rendahnya Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Ketersediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/ biji berminyak, gula, sayur dan buah masih relatif rendah untuk memenuhi ketersediaan energi dan skor PPH ketersediaan	1. Belum tersedianya data pemantauan dan pengelolaan susut pangan untuk meningkatkan efisiensi sistem pangan sekaligus menjaga ketersediaan pangan daerah. 2. Belum tersedianya data keluar masuk Distribusi Pangan
2	Skore Pola Pangan Harapan Konsumsi masih Belum Optimal	Konsumsi energi pada komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan total energi masih belum memenuhi rekomendasi konsumsi energi ideal menurut kelompok pangan	Masih Kurangnya Edukasi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		Belum idealnya pola pangan harapan masyarakat, yang ditunjukkan oleh konsumsi pangan masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacangkacangan masih relatif rendah	Kurangnya pengetahuan gizi dan konsumsi pangan lokal B2SA akibat tingkat pendidikan yang masih rendah
3	Masih Terdapat Daerah Rentan Rawan Pangan	Jarak tempuh yang jauh dan kondisi geografis (terutama di daerah perairan) mempersulit pengiriman bahan pangan dari sentra produksi ke wilayah rawan	Intervensi penanganan Desa rentan rawan pangan masih belum terkoordinasi dengan baikPerlunya pemerataan penyaluran/ distribusi pangan
		Beberapa wilayah, khususnya yang berada di atas air, tidak memiliki lahan untuk pertanian produktif, menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah	Peta rawan pangan yang sudah dibuat belum dipedomani dalam rangka intervensi
		Terdapat penduduk rentan rawan pangan yang secara umum belum mempunyai akses untuk memperoleh serta menyerap pangan	Belum meratanya distribusi bantuan pangan pada daerah rentan rawan pangan

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Bertitik tolak dari permasalahan utama di bidang pangan yang telah diuraikan di atas, diidentifikasi potensi, isu KLHS RPJMD, dinamika isu di tingkat global, isu nasional, isu regional, dan isu Kabupaten maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan ketahanan pangan dalam periode 2025-2029. Secara rinci perumusan isu strategis dapat disajikan pada tabel 2.26 berikut :

Tabel 2.26. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program ketahanan pangan bersumber dari dana desa serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani urusan pangan	Sebagai penyangga IKN, lahan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara beresiko tertekan oleh pembangunan IKN dan kawasan perkotaan	SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) SDG 2 (Tanpa Kelaparan)	Penguatan ketahanan pangan nasional untuk mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia.	1. Masih terdapatnya kemiskinan dan kelaparan (PoU) 2. Kualitas permukiman, air bersih, sanitasi, energi bersih, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan masih rendah 3. Dampak pembangunan IKN di Pulau Kalimantan 4. Ketergantungan pada ekonomi ekstraktif (migas dan tambang) 5. Rendahnya interkonektivitas dan aksesibilitas infrastruktur	Peran strategis sebagai Penyangga IKN yaitu Kalimantan Timur berperan sebagai Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pangan, Pusat Permukiman Perkotaan dan Pusat Pariwisata
Tersedianya database ketahanan pangan untuk menyusun proyeksi kebutuhan pangan	1. Belum optimalnya sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan serta upaya pengurangan food loss pada tahap panen, pasca panen dan pengemasan. 2. Potensi peningkatan laju pertumbuhan penduduk dengan adanya IKN	1. Daya dukung lahan masih memenuhi kebutuhan lahan per jiwa di setiap kecamatan 2. Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat berswasembada pangan. Hal ini disebabkan karena daya dukung wilayah pertanian hanya menunjukkan angka 0,25 (<1) 3. Rata-rata pertumbuhan penduduk (sebelum delineasi ke wilayah IKN) 1,24% / tahun	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 12 (Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan)	Tantangan pemenuhan kebutuhan pangan seiring peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi.	1. Kerentanan sistem pangan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi ekosistem. 2. Terbatasnya pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan produktif yang terhubung hulu-hilir. 3. Masih rendahnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi berbasis pangan. 4. Ketimpangan pemerataan infrastruktur logistik pangan, irigasi, dan sarana distribusi antarwilayah.	Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat
Tersedianya sumberdaya pangan lokal sumber karbohidrat, protein dan vitamin mineral	1. Pemanfaatan dan pengembangan jagung dan umbi-umbian belum maksimal untuk memperkuat diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber karbohidrat. 2. Kontribusi sektor kelautan & perikanan terhadap penyediaan protein hewani belum optimal. 3. Belum tersedianya data distribusi pangan	Diversifikasi pangan masih belum optimal, ancaman kerentanan gizi	SDG 2 (Tanpa Kelaparan)	Diversifikasi pangan belum optimal, ketergantungan pada beras masih tinggi.	1. Diversifikasi pangan belum optimal, pemanfaatan jagung, umbi, dan kacang-kacangan masih rendah. 2. Kontribusi sektor perikanan terhadap penyediaan protein hewani belum optimal.	Ketersediaan pangan belum beranekaragam yang ditunjukkan oleh skor PPH ketersediaan 94,12

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Sudah ada gerakan penganekaragaman konsumsi pangan sejak dini 2. Tersedianya bantuan pangan untuk kelompok rentan	1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat untuk konsumsi pangan B2SA 2. Terdapat rumah tangga miskin (kuintil 1-2) yang mengonsumsi pangan di bawah standar (< 1.890 kkal/kapita/hari) 3. Rumah tangga dengan pengeluaran tinggi (kuintil 5) mengonsumsi pangan dalam jumlah berlebih, yaitu 2.723 kkal/kapita/hari	Pola konsumsi pangan belum sesuai gizi seimbang, dominan karbohidrat dan rendah nya konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan)	Pola konsumsi masyarakat belum sesuai pedoman gizi seimbang dan pangan B2SA yang antara lain disebabkan oleh tingkat pengetahuan, preferensi, kondisi ekonomi dan ketersediaan bahan pangan Ancaman terhadap ketahanan pangan akibat berkurangnya lahan sawah dan tantangan menjaga kapasitas	Pola konsumsi masyarakat belum sesuai pedoman gizi seimbang dan pangan B2SA yang antara lain disebabkan oleh tingkat pengetahuan, preferensi, kondisi ekonomi dan ketersediaan Bahan pangan	Konsumsi pangan belum beranekaragam yang ditunjukkan oleh skor PPH konsumsi pangan 93,7
Produksi beras tahun 2024 sebesar 105.561 ton dan menunjukkan peningkatan 8,2% selama 2019-2024	Adanya potensi konflik pemanfaatan lahan untuk pangan dan non pangan	Perlu diperhatikan risiko kerentanan terhadap gangguan iklim jika ketergantungan tinggi pada satu komoditas. Bencana yang sering terjadi adalah kebakaran hutan/lahan dan banjir. Lahan yang digunakan untuk tanaman pangan adalah seluas 307.348,17 Ha	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	Ancaman terhadap ketahanan pangan akibat berkurangnya lahan sawah dan tantangan menjaga kapasitas produksi beras	1. Ancaman terhadap ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan sawah. 2. Risiko iklim (banjir, kebakaran hutan/lahan) yang mengganggu produksi. 3. Potensi konflik pemanfaatan lahan pangan dan non-pangan.	Menjaga keberlanjutan dan stabilitas produksi beras untuk memenuhi kebutuhan lokal, mendukung Ibu Kota Nusantara, dan mempertahankan peran sebagai sentra produksi beras di Kalimantan Timur.
Peluang pengembangan ekonomi sirkular pangan untuk menurunkan sisa pangan akibat perilaku boros	Pada tahun 2024, sisa makanan sebanyak 34,58% dari total sampah. Rumah tangga merupakan sumber sampah terbesar (86,22%)	Food waste yang belum dikelola dari rumah tangga maupun instansi (Horeka dan lainnya) berdampak pada timbulan sampah	SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan)	Tingginya food loss and waste (FLW) di sepanjang rantai pasok pangan Indonesia	1. Masih tingginya sisa pangan di tingkat konsumsi akibat perilaku boros pangan. 2. Belum berkembangnya ekonomi sirkular pangan untuk mengurangi food loss & waste. 3. Keterbatasan pengelolaan sampah makanan dari rumah tangga dan Horeka.	Masih tingginya sisa pangan di tingkat konsumsi akibat perilaku boros pangan
Tersedianya bantuan pangan bagi kelompok rentan	1. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan 8,06% (2024) 2. Persentase penduduk miskin 7,28 % (2024) 3. Prevalensi stunting 14,3% (2024)	Ketimpangan akses wilayah perkotaan-perdesaan	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	Masih adanya ketimpangan akses pangan dan gizi antar wilayah serta tingginya angka stunting dan masalah gizi lainnya	Ketimpangan sosial-ekonomi memperlebar kesenjangan akses pangan bergizi.	Akses pangan masyarakat belum merata sehingga masih ada ketidakcukupan konsumsi pangan dan masalah gizi.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya program/kegiatan penanganan kerawanan pangan	Terdapat 6 desa rentan rawan pangan prioritas 2 dan 12 desa rentan rawan pangan prioritas 3 (2024)	Terdapat wilayah rentan rawan pangan akibat kondisi geografis, hambatan akses dan distribusi pangan serta bencana	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) SDG 2 (Tanpa Kelaparan)	Kerentanan pangan di daerah tertinggal, perbatasan, dan wilayah rawan bencana.	1. Masih terdapat wilayah rawan pangan karena hambatan akses, distribusi, dan kondisi geografis. 2. Kerentanan pangan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana.	Masih terdapat daerah rawan pangan yang memerlukan intervensi/penanganan
Tersedianya kelembagaan keamanan pangan (OKKPD) Tersedianya program/kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Belum seluruh pangan segar yang beredar aman (capaian persentase keamanan pangsn segar adalah 93,44 %)	Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan sehingga menjadi ancamam residu pada produk sayur buah lokal	SDG 2 (Tanpa Kelaparan) SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Belum optimalnya sistem pengawasan keamanan pangan segar	1. Belum optimalnya pengawasan pangan segar. 2. Masih adanya risiko residu pestisida dan pupuk kimia pada produk lokal. 3. Keterbatasan sistem jaminan mutu dan	Masih adanya risiko keamanan pangan segar sehingga memerlukan penguatan sistem pengawasan, pengujian, dan penjaminan mutu secara terpadu.
Penyempurnaan indikator dan target ketahanan pangan	Adanya indikator yang tidak mencapai standar kinerja namun sudah sesuai dengan standar ideal ketahanan pangan	Indikator yang digunakan perlu mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan	SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)	Kebutuhan harmonisasi indikator dan target ketahanan pangan nasional sesuai standar FAO/SDGs.	Beberapa indikator ketahanan pangan belum mencapai target kinerja maupun standar ideal.	Perbaikan acuan dan target kinerja ketahanan pangan yang disesuaikan dengan target ideal
Penguatan manajemen data ketahanan pangan	Ketersediaan data dasar lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan belum terintegrasi	Keterbatasan integrasi data lintas sektor	SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) SDG 2 (Tanpa Kelaparan)	Belum optimalnya sistem satu data pangan dan gizi nasional yang terintegrasi lintas sektor	1. Belum optimalnya sistem satu data pangan dan gizi yang terintegrasi lintas sektor. 2. Hambatan koordinasi pusat-provinsi-kabupaten menyebabkan lemahnya sinkronisasi program.	Manajemen data ketahanan pangan belum optimal
1. Penguatan sinergitas pada RPJMD melalui rencana aksi tematik lintas sektor 2. Alokasi dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan yang dikelola melalui BUMDes, Koperasi maupun lembaga lainnya (Surat Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Mendukung Swasembada Pangan)	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan program dan anggaran lintas sektor Keterbatasan integrasi data dan informasi terkait pangan antar sektor Kapasitas kelembagaan di desa/kelurahan terbatas	Belum optimalnya koordinasi lintas wilayah dan antar perangkat daerah	SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)	Fragmentasi kebijakan dan tantangan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pusat-daerah dalam pembangunan pangan dan gizi.	Belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah urusan pangan dengan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan	Koordinasi lintas sektor antar dinas dan lintas wilayah dengan desa/kelurahan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan belum optimal

Dari tabel diatas dapat disampaikan isu-isu strategis dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan belum beranekaragam yang ditunjukkan oleh skor PPH ketersediaan 94,12, Diversifikasi pangan belum optimal, pemanfaatan jagung, umbi, dan kacang-kacangan masih rendah.
2. Pola konsumsi masyarakat belum sesuai pedoman gizi seimbang dan pangan B2SA yang antara lain disebabkan oleh tingkat pengetahuan, preferensi, kondisi ekonomi dan ketersediaan Bahan pangan
3. Masih terdapat daerah rawan pangan yang memerlukan intervensi/penanganan, Masih terdapat wilayah rawan pangan karena hambatan akses, distribusi, dan kondisi geografis.
4. Masih adanya risiko keamanan pangan segar sehingga memerlukan penguatan sistem pengawasan, pengujian, dan penjaminan mutu secara terpadu.
5. Koordinasi lintas sektor antar dinas dan lintas wilayah dengan desa/kelurahan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka konsep Renstra Dinas Ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai sebagaimana Gambar 3.1 yang merupakan peta jalan bagaimana perangkat daerah menerjemahkan visi, misi, dan sasaran RPJMD ke dalam kerangka kerja yang lebih operasional. Setiap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tidak disusun secara terpisah, tetapi saling berkaitan secara logis dan hirarkis.

Gambar 3.1 Konsep Rensta Dinas Ketahanan Pangan

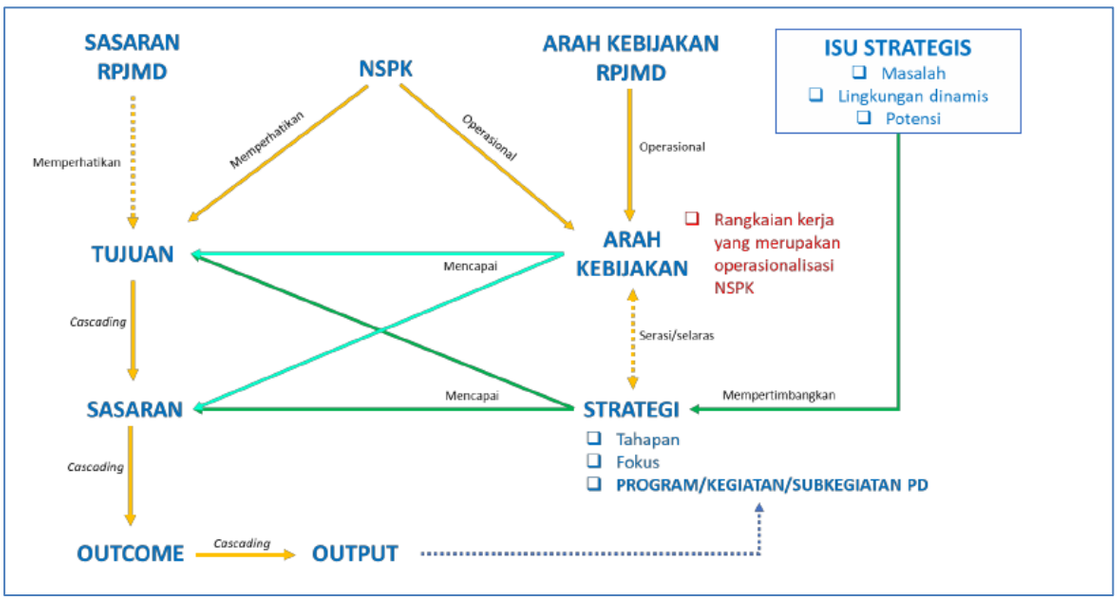

Gambar 3.1 merupakan kerangka yang memperlihatkan bahwa tujuan Renstra PD ditetapkan dengan memperhatikan sasaran RPJMD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pangan sesuai kewenangan daerah. Tujuan kemudian diturunkan menjadi sasaran Renstra, yang berfungsi sebagai *outcome* antara yang lebih terukur. Pencapaian sasaran memerlukan strategi berupa tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan isu strategis, baik berupa permasalahan, dinamika lingkungan, maupun potensi daerah. Strategi tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD dan berfungsi sebagai jembatan antara tujuan normatif dengan implementasi teknis di lapangan. Kerangka ini membagi Bab III dibagi ke dalam empat sub-bab utama:

- 3.1 Tujuan Renstra, merumuskan kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan.
- 3.2 Sasaran Renstra, menjabarkan target terukur dari setiap tujuan.
- 3.3 Strategi Renstra, memuat tahapan dan fokus tindakan dalam mencapai sasaran.
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra, menjadi panduan operasional untuk memastikan strategi dapat dijalankan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kerangka tersebut menjadikan Bab III sebagai fondasi penting bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan keterkaitan antara arah pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten dengan kebutuhan serta potensi lokal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.1. Tujuan Renstra Prangkat Daerah

Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Sebagaimana tergambar dalam alur keterkaitan antara RPJMD dan Renstra, tujuan perangkat daerah lahir dari kesinambungan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, kemudian diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai kewenangan urusan ketahanan pangan.

Pada level RPJMD, visi dan misi daerah diturunkan menjadi tujuan pembangunan yang lebih makro, selanjutnya dioperasionalkan melalui beberapa sasaran RPJMD. Dari sasaran tersebut diturunkan *outcome*, program, maupun kegiatan yang menjadi kewajiban kepala daerah untuk dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pada level perangkat daerah, tujuan Renstra menjadi simpul penghubung antara mandat pada RPJMD dengan tupoksi teknis dinas.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

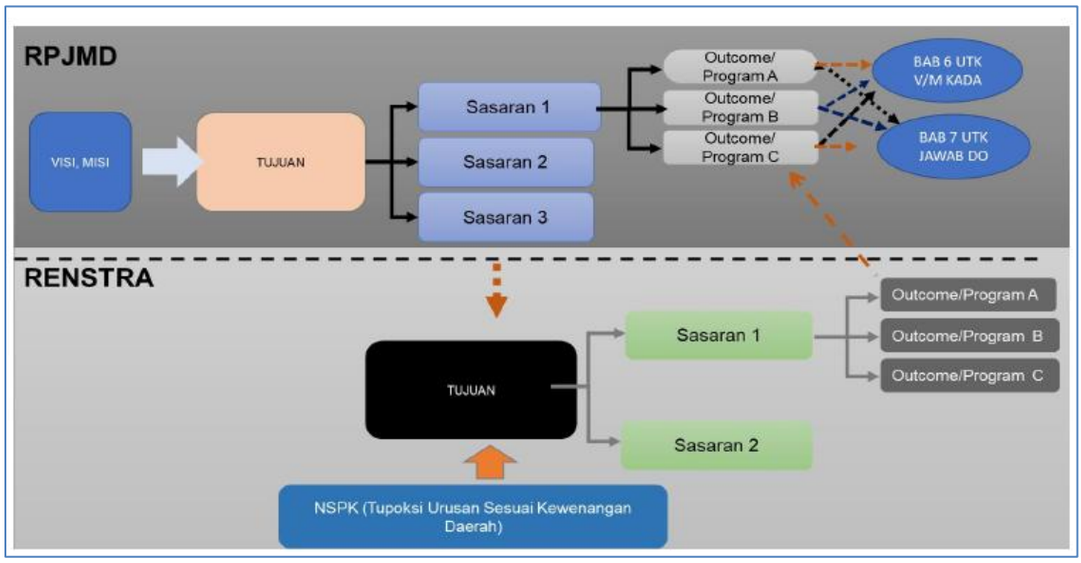

Penyusunan tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 merupakan turunan langsung dari arah pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Visi pembangunan daerah yaitu:

“Kukar Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Dalam visi tersebut, aspek “Sejahtera” menjadi pokok visi yang terkait langsung dengan bidang ketahanan pangan, karena kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai apabila ketersediaan pangan terjamin, konsumsi masyarakat beragam dan bergizi seimbang, serta kerawanan pangan dapat ditekan.

Terdapat dua Misi pembangunan daerah yang terkait erat dengan urusan ketahanan pangan, yang pertama adalah Misi 1, yaitu: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dari misi tersebut diturunkan sasaran RPJMD yang relevan, yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.” Salah satu indikator utamanya adalah menurunnya tingkat kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan wilayah.

Yang kedua adalah Misi 2, yaitu yaitu: *Terbaik* dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif. Misi tersebut didukung dengan Program Utama Petani Peternak Nelayan tangguh dalam mendukung peningkatan ketahanan Pangan Wilayah.

Sejalan dengan itu, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan Tujuan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025–2029 sebagai kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD, dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pangan.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berkelanjutan, melalui penguatan ketersediaan pangan beragam, bergizi, seimbang, aman, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pangan, dengan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola kelembagaan yang efektif dan adaptif.

Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, yang akan memastikan sektor ketahanan pangan tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian visi *Kukar Idaman Terbaik* menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan periode 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berkelanjutan
2. Menurunnya Kerawanan Pangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Dengan Gizi Seimbang
4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran tersebut dirancang untuk saling melengkapi, sehingga pencapaian indikator tidak hanya memperlihatkan perbaikan teknis di bidang ketersediaan dan konsumsi pangan, tetapi juga mencerminkan perbaikan tata kelola, akuntabilitas, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kerawanan pangan. Dengan demikian, sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan menjadi dasar yang jelas dan terukur dalam mengarahkan strategi serta kebijakan yang akan ditetapkan pada sub bab berikutnya.

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan											
- Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	87,16	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	94,12	94,12	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
			Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) (%)	102,95	108,65	110	110	110	110	110	
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))	93,80	94,14	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
		Menurunnya Kerawanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	8,06	7,74	7,56	7,48	7,30	7,12	6,94	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra merupakan rencana tindakan komprehensif yang disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran ketahanan pangan secara bertahap. Strategi ini mencakup penguatan fondasi, pengembangan kelembagaan, integrasi lintas sektor, penerapan inovasi, hingga pencapaian keberlanjutan sistem pangan. Berdasarkan penahapan pembangunan daerah dan kondisi aktual ketahanan pangan, strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai mana tabel 3.4.

Strategi berlapis dari fondasi hingga keberlanjutan memungkinkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara merancang pencapaian sasaran ketahanan pangan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin kemandirian dan resiliensi pangan jangka panjang. Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui produksi pertanian pangan lokal dan pencegahan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*).
2. Penguatan lumbung pangan masyarakat dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan.
3. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah
4. Stabilisasi harga dan pasokan di tingkat produsen dan konsumen
5. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk penganekaragaman konsumsi pangan
6. Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan Aman
7. Penanganan desa rentan terhadap rawan pangan secara lintas sektor
8. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lintas sektor
9. Peningkatan jumlah produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu.

TABEL 3.2.

PENAHAPAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATENKUTAI KARTANEGARA

	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Ketahanan Pangan	Integrasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Inovasi dan Teknologi untuk Ketahanan Pangan	Penguatan Keberlanjutan Sistem Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Pengembangan *database* ketahanan pangan	Penguatan manajemen *database* ketahanan pangan	Integrasi *database* ketahanan pangan dengan sektor lain terkait	Pengembangan sistem informasi pangan	Penyelarasan capaian indikator ketahanan pangan	Pemanfaatan data ketahanan pangan untuk pencapaian ketahanan pangan wilayah
Penguatan ketahanan pangan	Penguatan lumbung pangan masyarakat dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan	Integrasi program penanganan masalah gizi dengan intervensi ketahanan pangan	Penguatan kelembagaan pangan di tingkat desa untuk mengatasi kerawanan pangan	Integrasi penanganan kerawanan pangan lintas sektor lintas wilayah	Pencapaian keberlanjutan ketahanan pangan
Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pengadaan, pemeliharaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Pengadaan, pemeliharaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Pengadaan, pemeliharaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Pengadaan, pemeliharaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	Pemenuhan standar cadangan pangan Pemerintah Daerah

	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Ketahanan Pangan	Integrasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Inovasi dan Teknologi untuk Ketahanan Pangan	Penguatan Keberlanjutan Sistem Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Sinkronisasi pemantauan stok, harga dan pasokan pangan	Penentuan harga minimum pangan lokal sesuai kewenangan daerah	Optimalisasi prognosa neraca pangan wilayah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	Inovasi penguatan sistem distribusi dan logistik pangan	Evaluasi efektivitas distribusi pangan dan mekanisme stabilisasi harga pangan	Stabilitas ketersediaan dan harga pangan
Penguatan regulasi / kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang	Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, khususnya di desa rentan rawan pangan dan desa lokus *stunting*	Inovasi produk pangan lokal unggulan daerah untuk pengembangan usaha masyarakat dan penganekaragaman konsumsi pangan	Penguatan edukasi gizi berbasis konsumsi pangan lokal yang beragam bergizi seimbang pada generasi muda	Implementasi konsumsi pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman
Penguatan regulasi / kebijakan pengurangan sisa pangan	Pengembangan model ekonomi sirkular pangan di komunitas	Integrasi ekonomi sirkular pangan dengan program perlindungan sosial	Penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sisa pangan	Redistribusi pangan berlebih ke masyarakat rentan	Pengurangan sisa pangan
Pengawasan keamanan pangan segar	Penyediaan sarana uji keamanan dan mutu pangan pangan segar	Integrasi sistem pengawasan keamanan pangan segar	Penerapan standar keamanan pangan segar	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dan pemeli-haraan sarana uji	Pangan segar aman beredar

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan arah kebijakan ini diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan ke dalam strategi yang lebih terukur, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara efektif. Arah kebijakan ini tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, tetapi juga memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan dalam pembangunan ketahanan pangan daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

TABEL 3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	NSPK: Ketersediaan Pangan; NSPK: Stabilisasi pasokan dan harga pangan; NSPK: Distribusi dan cadangan pangan	Hilirisasi Produk Pertanian dan pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis IT dan pemanfaatan Inovasi Daerah	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang melalui optimalisasi produksi pangan lokal, Penyediaan sarana Pasca Panen, penguatan cadangan pangan, dan stabilisasi pasokan pangan	
2	NSPK: Penganekaragaman konsumsi pangan; NSPK: Pengawasan keamanan dan mutu pangan; NSPK : Keamanan, mutu, label, iklan dan kelembagaan keamanan dan	Peningkatan produktivitas angkatan kerja berbasis keterampilan dan keahlian	Perubahan perilaku konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sejak dini serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam inovasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	
3	NSPK: Pengendalian kerawanan pangan; NSPK: Kewaspadaan pangan dan gizi	Penguatan perlindungan sosial berbasis pemanfaatan data perlindungan sosial yang berkualitas	Penguatan perlindungan sosial berbasis pangan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai implementasi dari strategi dan kebijakan penyelenggaraan pangan, langkah-langkah operasional dirumuskan melalui program pembangunan ketahanan pangan yang melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan kurun waktu lima tahun ke depan (tahun 2025-2029) yang dituangkan dalam program Dinas Ketahanan Pangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sehingga pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029

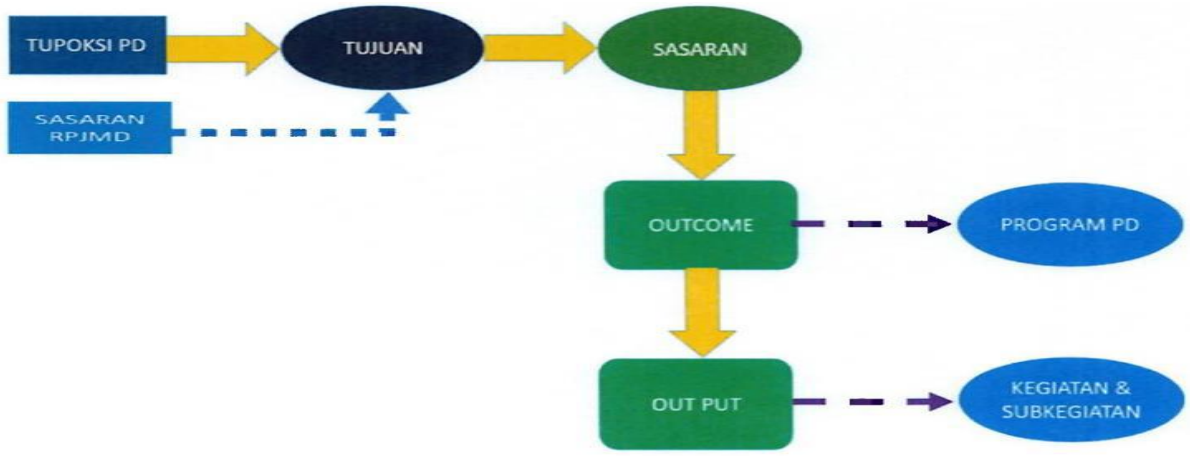

4.1. Uraian Program

Sesuai strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka dirumuskan program-program prioritas beserta kegiatan untuk masing-masing program sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Adapun program program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					52.868.585.612,00		32.092.118.569,00		33.721.947.165,01		36.939.945.807,65		38.164.966.225,56	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.775.265.612,00		13.342.118.569,00		13.976.947.165,01		14.334.945.807,65		14.222.466.225,56	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	66,94	68,00	69,00	11.775.265.612,00	70,00	13.342.118.569,00	71,00	13.976.947.165,01	72,00	14.334.945.807,65	73,00	14.222.466.225,56	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					15.770.000.000,00		5.300.000.000,00		5.300.000.000,00		6.700.000.000,00		6.900.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	200	100	100	15.770.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	6.700.000.000,00	100	6.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					19.087.960.000,00		10.800.000.000,00		11.270.000.000,00		12.155.000.000,00		12.992.500.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	93,80	93,8	94	19.087.960.000,00	94,5	10.800.000.000,00	95	11.270.000.000,00	95,5	12.155.000.000,00	96	12.992.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.200.000.000,00		1.700.000.000,00		2.100.000.000,00		2.550.000.000,00		2.800.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	7,3	6,75	5,90	2.200.000.000,00	5,06	1.700.000.000,00	4,22	2.100.000.000,00	3,38	2.550.000.000,00	3,00	2.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					4.035.360.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	93	71,26	72,78	4.035.360.000,00	73,79	950.000.000,00	74,80	1.075.000.000,00	75,82	1.200.000.000,00	76,83	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					52.868.585.612.00		32.092.118.569.00		33.721.947.165.01		36.939.945.807.65		38.164.966.225.56	

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan rangkaian aktivitas pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menghasilkan keluaran (output) yang mendukung pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Program dan kegiatan pada tahun 2026- 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan, sekaligus menjadi pijakan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 – 2029. Terdapat 16 kegiatan Dinas Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
4. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
7. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
8. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13. Administrasi Umum Perangkat Daerah
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TAHUN 2025 - 2029

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan							
- Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berkelanjutan			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
					Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) (%)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berkelanjutan			Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Stabilitas harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
				Tersedianya regulasi yang menjamin harga minimum pangan pokok lokal	Cakupan regulasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	2.09.03.2.03 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG (kecukupan konsumsi energi dan protein)	Tingkat Kecukupan Konsumsi pangan sesuai AKG : 1. Kecukupan Konsumsi Enegi 2. Kecukupan Konsumsi Protein	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG (kecukupan konsumsi energi dan protein)	Tingkat Kecukupan Konsumsi pangan sesuai AKG : 1. Kecukupan Konsumsi Enegi 2. Kecukupan Konsumsi Protein	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Menurunnya Kerawanan Pangan Daerah			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Terlaksananya Penyusunan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terselenggaranya penanganan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota sesuai jumlah dan jenis kasus yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah penanganan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota sesuai jumlah dan jenis kasus yang menjadi kewenangan daerah	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan merupakan instrumen utama dalam menjabarkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama periode perencanaan. Penyusunan rencana ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang logis dan sistematis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta alokasi sumber daya pendanaan yang diperlukan.

Rencana pendanaan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta potensi dukungan dari sumber pendanaan lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Transfer ke Daerah, maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan kebutuhan pendanaan dilakukan secara berjenjang dan terukur, dimulai dari identifikasi kebutuhan program, kegiatan, dan subkegiatan, kemudian dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, serta dalam mendukung Program Dedikasi Pemerintah daerah.

Alokasi pendanaan disusun berdasarkan prioritas sebagai berikut :

1. Alokasi untuk Belanja Wajib dan Mengikat.
2. Alokasi untuk Belanja Prioritas untuk Program Dedikasi Kepala Daerah
3. Alokasi Untuk Layanan Umum yang mendukung Core Bisnis Perangkat Daerah
4. Alokasi untuk Belanja dalam rangka pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.

Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Ketahanan Pangan, secara garis besar dialokasikan untuk Program-Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk lebih jelas dan terinci Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagaimana tabel (Tabel 4.3).

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					52.868.585.612,00		32.092.118.569,00		33.721.947.165,01		36.939.945.807,65		38.164.966.225,56			
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.775.265.612,00		13.342.118.569,00		13.976.947.165,01		14.334.945.807,65		14.222.466.225,56			
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	66,94	68,00	69,00	11.775.265.612,00	70,00	13.342.118.569,00	71,00	13.976.947.165,01	72,00	14.334.945.807,65	73,00	14.222.466.225,56	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00			
Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	5	500.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2		2		2		2		2				
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5				
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00			
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGARA	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00			
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
2.09.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.111.593.556,00		9.725.000.000,00		9.925.000.000,00		10.025.000.000,00		10.225.000.000,00			
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	9.111.593.556,00	12	9.725.000.000,00	12	9.925.000.000,00	12	10.025.000.000,00	12	10.225.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	756	980		980		980		980		980				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.886.593.556,00		9.500.000.000,00		9.700.000.000,00		9.800.000.000,00		10.000.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	756	980	8.886.593.556,00	980	9.500.000.000,00	980	9.700.000.000,00	980	9.800.000.000,00	980	10.000.000.000,00			
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00			
2.09.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00			
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0	1	1	200.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0	1	1	200.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
2.09.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.09.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					145.000.000,00		183.069.809,00		180.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00			
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	145.000.000,00	30	183.069.809,00	30	180.000.000,00	30	380.000.000,00	30	380.000.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170	0		0		0		170		170				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0		30		30		30		30				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	30		15		15		15		15				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2			1		1		1		1				
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170	200.000.000,00	170	200.000.000,00			
2.09.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan					120.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	20	0	30	120.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00			
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		28.069.809,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00	30	28.069.809,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00			
2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (Orang)	0	0	0	0,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00			
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					690.000.000,00		695.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			
Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	5	690.000.000,00	5	695.000.000,00	5	800.000.000,00	5	800.000.000,00	5	800.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	60		60		60		60		60				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	250	150	150		200		250		250		250				
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	2	2	140.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00			
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	150	150	150.000.000,00	200	200.000.000,00	250	250.000.000,00	250	250.000.000,00	250	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.000	2.000	2.000	50.000.000,00	2.000	70.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00			
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.217.000,00		765.000.000,00		1.067.898.405,01		1.115.897.047,65		803.417.465,56			
Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	120	0		50		20		30		30				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	310.217.000,00	1	765.000.000,00	1	1.067.898.405,01	1	1.115.897.047,65	1	803.417.465,56			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0		0		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	21	40		5		10		8		8				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0		4		8		10		4				
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		160.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00		160.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0	0,00	4	160.000.000,00	8	320.000.000,00	10	400.000.000,00	4	160.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		350.000.000,00		145.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	120	0	0,00	50	350.000.000,00	20	145.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00			
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					310.217.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	21	40	310.217.000,00	5	100.000.000,00	10	200.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00			
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		237.898.405,01		190.000.000,00		190.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0	0,00	0	0,00	1	237.898.405,01	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00			
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		155.000.000,00		165.000.000,00		195.897.047,65		123.417.465,56		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	155.000.000,00	1	165.000.000,00	1	195.897.047,65	1	123.417.465,56			
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.455.056,00		599.048.760,00		599.048.760,00		609.048.760,00		609.048.760,00			
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	568.455.056,00	4	599.048.760,00	4	599.048.760,00	4	609.048.760,00	4	609.048.760,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	60.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00			
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					458.455.056,00		499.048.760,00		499.048.760,00		499.048.760,00		499.048.760,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	458.455.056,00	12	499.048.760,00	12	499.048.760,00	12	499.048.760,00	12	499.048.760,00			
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					250.000.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	50	250.000.000,00	50	370.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	2	2	5		5		5		5		5				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	28	28	28		28		28		28		28				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	5	50.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00			
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	28	28	100.000.000,00	28	120.000.000,00	28	150.000.000,00	28	150.000.000,00	28	150.000.000,00			
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00			
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					15.770.000.000,00		5.300.000.000,00		5.300.000.000,00		6.700.000.000,00		6.900.000.000,00			
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	200	100	100	15.770.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	6.700.000.000,00	100	6.900.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					15.770.000.000,00		5.300.000.000,00		5.300.000.000,00		6.700.000.000,00		6.900.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	3	5	4	15.770.000.000,00	2	5.300.000.000,00	2	5.300.000.000,00	4	6.700.000.000,00	4	6.900.000.000,00			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	5	140	105		103		103		106		106				
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					10.770.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.200.000.000,00		4.400.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	5	140	105	10.770.000.000,00	103	4.000.000.000,00	103	4.000.000.000,00	106	4.200.000.000,00	106	4.400.000.000,00			
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	0	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota					4.900.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	3	5	4	4.900.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00	4	2.400.000.000,00	4	2.400.000.000,00			
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					19.087.960.000,00		10.800.000.000,00		11.270.000.000,00		12.155.000.000,00		12.992.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	93,8	94	94,5	19.087.960.000,00	95	10.800.000.000,00	95,5	11.270.000.000,00	96	12.155.000.000,00	96,5	12.992.500.000,00			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					8.322.960.000,00		3.750.000.000,00		3.925.000.000,00		4.300.000.000,00		4.775.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan		
Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	0	2		2		2		2		2				
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0	1		1				1		1				
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	5	6	8.322.960.000,00	6	3.750.000.000,00	6	3.925.000.000,00	6	4.300.000.000,00	6	4.775.000.000,00			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	100	250		250		250		250		250				
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	4	15		2		2		2		3				
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota (laporan)	2	5	2		2		2		2		2				
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1.080.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0	1	1.080.000.000,00	1	500.000.000,00		500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	0	2	100.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	100	250	150.000.000,00	250	250.000.000,00	250	250.000.000,00	250	250.000.000,00	250	300.000.000,00			
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					4.730.460.000,00		2.000.000.000,00		2.300.000.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/	2	5	2	4.730.460.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.300.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.750.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	5	6	350.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	300.000.000,00			
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota					1.362.500.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/ kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	4	15	1.362.500.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	3	300.000.000,00			
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00			
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota					150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	2	150.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					100.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					9.305.000.000,00		5.850.000.000,00		5.875.000.000,00		6.175.000.000,00		6.287.500.000,00			
Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	0	0	16	9.305.000.000,00	10	5.850.000.000,00	10	5.875.000.000,00	10	6.175.000.000,00	10	6.287.500.000,00			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	308	125	125		50		50		50		50				
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	0	0	125		50		50		80		100				
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					1.900.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Ton)	308	125	125	1.900.000.000,00	50	700.000.000,00	50	700.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.200.000.000,00			
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota					150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		12.500.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	0	0	125	150.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	12.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)					7.255.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	0	0	16	7.255.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00			
2.09.03.2.03 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya regulasi yang menjamin harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal					0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					1.460.000.000,00		1.100.000.000,00		1.320.000.000,00		1.530.000.000,00		1.780.000.000,00			
Meningkatnya kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG (kecukupan konsumsi energi dan protein)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	1	1.460.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.320.000.000,00	1	1.530.000.000,00	1	1.780.000.000,00			
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	0	0		3		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	30	32	32		32		32		32		32				
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					110.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00			
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1.300.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	30	32	32	1.300.000.000,00	32	700.000.000,00	32	800.000.000,00	32	1.000.000.000,00	32	1.250.000.000,00			
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					50.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1	1	50.000.000,00	1	135.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					0,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	0	0	0,00	3	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.200.000.000,00		1.700.000.000,00		2.100.000.000,00		2.550.000.000,00		2.800.000.000,00			
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (%)	7,3	6,75	5,90	2.200.000.000,00	5,06	1.700.000.000,00	4,22	2.100.000.000,00	3,38	2.550.000.000,00	3,00	2.800.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Tersedianya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					2.000.000.000,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00		2.400.000.000,00		2.650.000.000,00			
Terselenggaranya penanganan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota sesuai jumlah dan jenis kasus yang menjadi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	2.000.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.950.000.000,00	1	2.400.000.000,00	1	2.650.000.000,00			
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	4	0		8		10		12		12				
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	8	8		8		8		8		8				
	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.800.000.000,00		750.000.000,00		900.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	8	8	1.800.000.000,00	8	750.000.000,00	8	900.000.000,00	8	1.250.000.000,00	8	1.500.000.000,00			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					0,00		400.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00			
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	4	0	0,00	8	400.000.000,00	10	650.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00			
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					4.035.360.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00			
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	93	71,26	72,78	4.035.360.000,00	73,79	950.000.000,00	74,80	1.075.000.000,00	75,82	1.200.000.000,00	76,83	1.250.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					4.035.360.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00			
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	13	2	2	4.035.360.000,00	2	950.000.000,00	2	1.075.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.250.000.000,00			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	20	20		20		20		20		20				
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota (Dokumen)	12	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	20	20		20		20		20		20				
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	20	20		20		20		20		20				
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	20	20	350.000.000,00	20	200.000.000,00	20	225.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / *OUTPUT*	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)*	*(17)*
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					350.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	20	20	350.000.000,00	20	200.000.000,00	20	225.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00			
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota					3.000.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	12	1	1	3.000.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00			
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					50.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	20	20	50.000.000,00	20	100.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00			
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					285.360.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		KAB. KUTAI KARTANEGA RA	
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	umlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	13	2	2	285.360.000,00	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00			

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan Prioritas dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari Program Prioritas Pembangunan Daerah. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga setiap intervensi yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan. Sub Kegiatan Prioritas tidak hanya berperan sebagai instrumen pelaksanaan program, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah serta program Dedikasi Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Pencapaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 4.4.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Mendukung Program Dedikasi dalam Pelaksanaan Program Stimulus Petani/ Peternak/ Nelayan Tangguh. Mendukung penurunan kemiskinan dengan mengurangi kantong kemiskinan
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, mendukung program penurunan stunting, secara tidak langsung mendukung Program penurunan kemiskinan serta mendukung pengendalian inflasi melalui ketersediaan pasokan pangan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sub kegiatan ini mendukung Program penurunan stunting, dan Secara tidak langsung mendukung program penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran
			2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Mendukung pengendalian Inflasi melalui keterjangkauan harga melalui Gerakan pangan Murah
			2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mendukung penurunan stunting serta mendukung Pengendalian Inflasi melalui ketersediaan pasokan pangan
			2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Berperan dalam Pengendalian inflasi melalui Komunikasi yang efektif, sehingga tersedia data yang menggambarkan terjadinya inflasi di daerah
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kegiatan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan Pangan, ketersediaan Energi dan Protein yang ada di daerah yang merupakan IKU Dinas Ketahanan PanganBerperan dalam Pengendalian inflasi melalui Komunikasi yang efektif, sehingga tersedia data yang menggambarkan terjadinya inflasi di daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Secara tidak langsung berperan dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran, serta Mendukung Penurunan angka inflasi melalui Ketersediaan pasokan pangan
			2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Untuk Mendukung Penurunan angka inflasi melalui Ketersediaan pasokan pangan
			2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Mendukung Program Dedikasi dalam Pelaksanaan Program Stimulus Petani/ Peternak/Nelayan Tangguh
			2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kegiatan penting karena untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat, dan pengambilan kebijakan dalam intervensi. Serta untuk mengetahui Skor PPH yang merupakan Indikator Utama Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mendukung program Penurunan Stunting, kegiatan penunjang dalam Menurunkan kemiskinan melalui kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga serta, Berperan dalam penurunan inflasi melalui Ketersediaan pasokan pangan
			2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk mendukung program Penurunan Stunting
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Merupakan Kegiatan penunjang dalam penurunan kemiskinan melalui pemetaan Desa Rentan Rawan pangan
			2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Menrupakan kegiatan penunjang dalam penurunan kemiskinan 2. Kegiatan berperan dalam pengendalian inflasi melalui ketersediaan pasokan pangan
			2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Kegiatan ini diarahkan untuk gerakan penyelamatan Pangan (Stop Boros Pangan) 2. Untuk mendukung program dalam Aksi Bangda dalam Penurunan Stunting
			2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kegiatan untuk mengetahui Situasi kondisi Pangan dan Gizi Masyarakat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan intervensi
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Mempunyai Bobot yang besar dalam penurunan stunting, termasuk dalam Aksi Bangda dalam Penurunan Stunting
			2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Untuk mendukung program dalam Aksi Bangda dalam Penurunan Stunting
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Untuk mendukung program dalam Aksi Bangda dalam Penurunan Stunting

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun ke depan, tentunya diperlukan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran terukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, mencakup aspek kesejahteraan, pelayanan publik, pemerataan, dan daya saing, serta berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. IKD mencerminkan pencapaian *outcome* dari program pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Sesuai dengan aspek Geografi dan Demografi, Indikator Kinerja Daerah Untuk Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Indek Ketahanan Pangan (IKP)
2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Indeks Ketahanan Pangan menjadi Indikator Kinerja Daerah yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi ketahanan pangan disuatu wilayah baik di provinsi maupun kabupaten

Indek Ketahanan Pangan mencakup tiga dimensi utama ketahanan pangan, meliputi :

1. Ketersediaan Pangan : Ketersediaan Pangan yang Cukup di suatu wilayah
2. Akses Pangan : Kemampuan Masyarakat untuk mengakses pangan secara fisik, ekonomi dan sosial
3. Pemanfaatan pangan : Kualitas dan kecukupan Gizi Pangan termasuk kualitas air minum serta kesehatan balita dan rumah tangga.

Perkembangan Indek Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5.a

INDEK KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2020 - 2025

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	Indeks Ketersediaan	81,76	81,40	79,63	78,27	80,09	87,33
2	Indeks Keterjangkauan	91,64	91,71	91,36	91,28	90,95	84,87
3	Indeks Pemanfatan	80,65	81,99	82,86	86,67	89,65	87,27
4	Komposit (Indeks Ketahanan Pangan)	84,28	84,73	84,44	85,53	87,17	86,50

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 terjadi kenaikan Indek Ketahanan Pangan rata-rata 0,58 poin. Pada tahun 2025 terjadi penurunan Indek Ketahanan Pangan karena adanya perubahan indikator dari Pemerintah pusat, tetapi peringkat IKP Kabupaten Kutai Kartanegara naik menjadi peringkat 3 Nasional.

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Daerah dan target yang telah ditetapkan, dapat dilihat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	87,16	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,06	7,74	7,56	7,48	7,30	7,12	6,94	

IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, dengan indikator yang telah diseleksi secara ketat agar relevan dan terukur. Indeks Ketahanan Pangan menjadi indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan karena mampu mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

- Prevalensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan (Prevalensi of Under Nourishment -PoU)
- Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
- Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)
- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.

Secara detail bisa dilihat pada tabel 4.5 berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA PD
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1,	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan									
2,	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	(%)	93,80	94,14	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
3,	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,06	7,74	7,56	7,48	7,30	7,12	6,94	
4,	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,12	94,12	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
5,	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	102,95	108,65	110	110	110	110	110	

4.6. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. IKK ketahanan pangan diarahkan untuk memperkuat Cadangan Pangan, Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan, Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan Harapan (PPH) Konsumsi serta meningkatkan Prosentase Pangan segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, maka Indikator Kunci yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Prosentase Jumlah cadangan Pangan Pemerintah
2. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten / Kota
3. Prosentase Daerah Rentan rawan Pangan
4. Prosentase Pangan segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana Tabel 4.7 dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 4.7. INDIKATOR KINERJA KUNCI

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

N0	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	200	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/ Kota	Score	93.80	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	7,3	6,75	5,90	5,06	4,22	3,38	3,00	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	93	71,26	72,78	73,79	74,8	75,82	76,83	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator utama, program dan kegiatan beserta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Ketahanan Pangan di kabupaten Kutai Kartanegara di 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada:

1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode renstra sebelumnya, yaitu 2021 – 2024,
2) Permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi, dan
3) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 adalah sebuah dokumen perencanaan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, sekaligus indikator utama, program dan kegiatan. Penyusunan Rancangan Dokumen Renstra ini mengacu pada visi, misi dan program daerah, Rencana Strategis Badan Pangan Nasional. Penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan juga memerhatikan isu strategis yang berkaitan dengan situasi ketahanan pangan daerah Kutai Kartanegara.

Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berkelanjutan serta Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan berkelanjutan

2. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan berkelanjutan
3. Menurunnya kerawanan pangan
4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau kegiatan (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan serta sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka memastikan perencanaan yang dimuat dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa kaidah pelaksaan. Kaidah pelaksanaan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran *(impact)* RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program *(outcome)* dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi dasar dalam penyusunan RKD dan DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Evaluasi RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun dengan menggunakan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjiP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan; dan
6. Dinas Ketahanan Pangan menyusun LKjiP yang sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan .

Tenggarong, 17 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANANIAS, S.Hut, MP
Pembina IV/a

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

JalanWolterMonginsidiTelp. (0541) 661031 - 661029 - 662088 Fax. 662056 KodePos 75511

TENGGARONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15/SK-SEKDA/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN 2025-2029 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. bahwa nama-nama yang ditetapkan sebagai anggota Tim berdasarkan usulan perangkat daerah pengusul dan dinilai mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

BerAKHLAK Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bangga melayani bangsa

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

BerAKHLAK
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun Anggaran 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64).

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan, tanggal 20 Maret 2025, Nomor: B-146/Disketapang-Set.III/ 000.1.2.B/03/2025 perihal Usulan Permohonan Penetapan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029;
c. melaksanakan koordinasi Intern Tim Penyusunan Guna Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
d. merumuskan kebijakan guna kelancaran Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029;
e. melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029;dan
g. melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

BerAKHLAK
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH: Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

BerAKHLAK
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15/SK-SEKDA/HK/2025, TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN 2025-2029 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

I. Penanggungjawab: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

II. Ketua: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

III. Sekretaris: Dra. Sutarti
NIP 19700521 199402 2 002
(Perencana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara)

IV. Anggota:
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Prof. DR. Ince Raden (Rektor Universitas Kutai Kartanegara)
5. Sudiro, SP
   NIP 197104122001122002
   (Analis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara)
6. Sanyoto Basuki, S.Sos
   NIP 196806051991121002
   (Analis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara)

BerAKHLAK
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

7. M. Juniansyah, SE
   NIP 197806302007011013
   (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara)

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BerAKHLAK
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
bangga melayani bangsa

Pohon Kinerja 2025-2029
Dinas Ketahanan Pangan

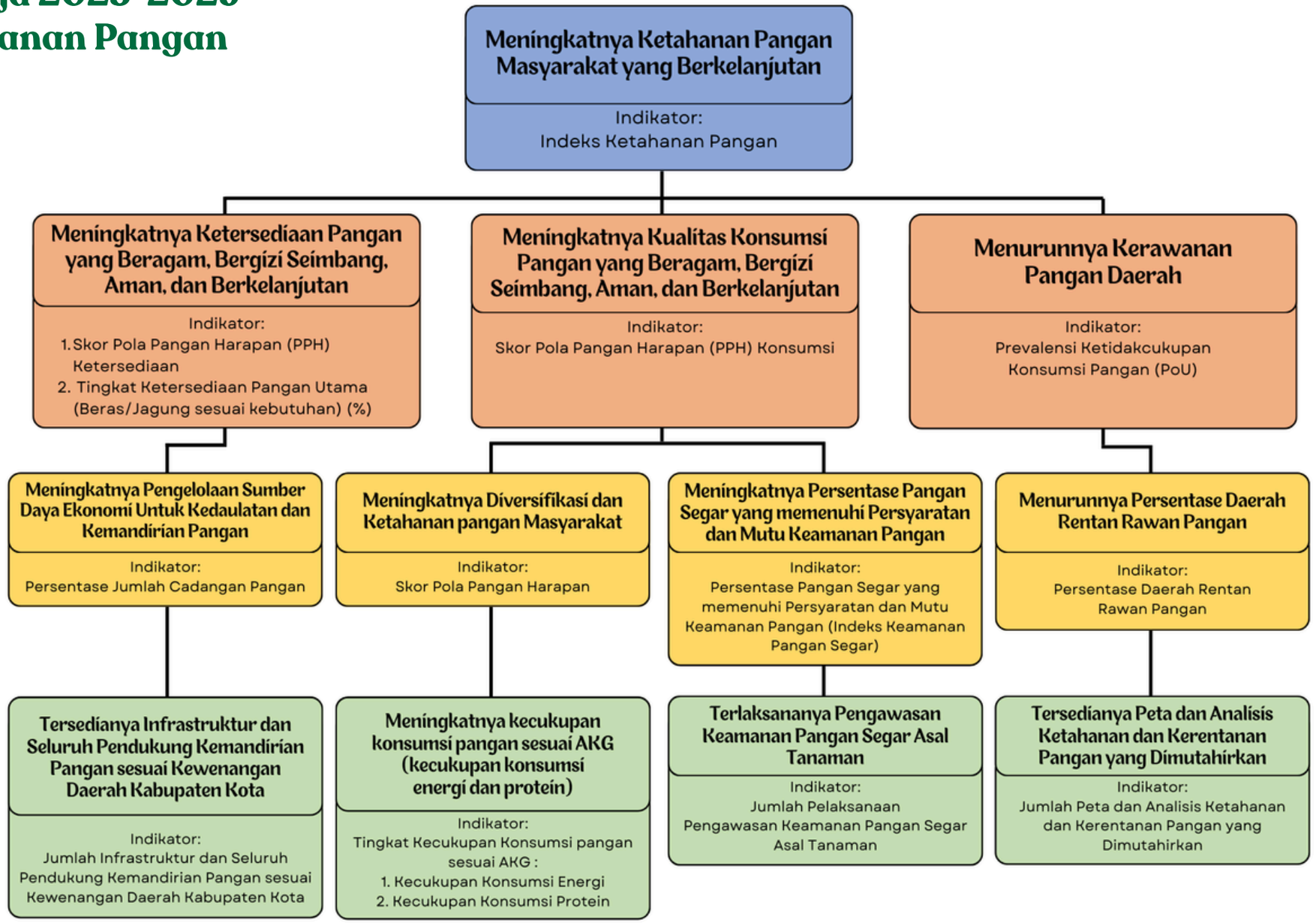

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANANIAS, S.Hut, MP
Pembina IV/a

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

disketapangkukar

disketapang.kukarkab.go.id